

LEMAH SYAHWAT SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi Kasus PA Barru atas Putusan Perkara Nomor 368/Pdt.G/2015/PA.Br)



SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab Hukum
Pada Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR
Oleh:
ASTRIA NINGSI
NIM: 10400113056

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UIN ALAUDDIN MAKASSAR

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Astria Ningsi
NIM : 10400113056
Tempat/Tgl.Lahir : Jawi-jawi/ 09 Juni 1995
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum
Alamat : Jl. Toddopuli 22 No.111a Blok 35
Judul : Lemah Syahwat Sebagai Alasan Perceraian Perspektif
Hukum Islam (Studi Kasus PA Barru) Atas Putusan Perkara
No.368/Pdt.G/2015/PA.Br.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALA UDDIN

MAKASSAR

Samata, 22 Mei 2017

Penyusun,



Astria Ningsi

NIM: 1040013056

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Lemah Syahwat sebagai alasan Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus PA Barru atas Putusan Perkara Nomor 368/Pdt.G/PA.Br)”, yang disusun oleh Astria Ningsi, NIM: 10400113056, mahasiswa jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Rabu, 14 Juni 2017 M, bertepatan dengan 19 Ramadhan 1438 H, dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H), tanpa (dengan beberapa perbaikan).

Samata, 14 Juni 2017 M
19 Ramadhan 1438 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. H. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.	(.....)
Sekretaris	: Dr. Abdillah Mustari, M.Ag.	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Hamza Hasan, M.Hi.	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Nur Taufik Sanusi, M.Ag.	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Darsul Puyu, M.Ag.	(.....)
Pembimbing II	: Irfan, S.Ag., M.Ag.	(.....)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

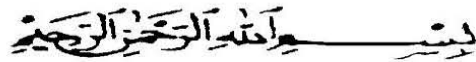
UIN Alauddin Makassar



Prof. Dr. H. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.

NIP: 19621016 199003 1 003

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat, Taufik, Hidayah serta, Inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi, dengan judul: “Lemah Syahwat Sebagai Alasan Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus PA Barru Atas Putusan Perkara Nomor 368/Pdt.G/2015/PA.Br.)” Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW.

Penyusun juga menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin bias terselesaikan apabila tanpa bantuan dan support dari berbagai pihak. Berkat pengorbanan, perhatian, serta motivasi merekalah, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Selesainya penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak penyusun haturkan kepada :

1. Ayahanda **Muh. Tamrin** dan Ibunda **Halimah** yang senantiasa mendukung dan memberikan do'a tiada henti demi kelancaran penyusunan skripsi ini. Jasamu tidak akan pernah kulupakan. Serta saudara-saudaraku dan keluarga yang tercinta, terima kasih atas dukungannya.

2. **Prof. Dr. Musafir Pababbari, M. Si.** Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Serta para pembantu Rektor beserta seluruh staf dan karyawannya.
3. **Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M. Ag.** Selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Beserta seluruh stafnya atas segala pelayanannya yang diberikan kepada penulis.
4. **Dr. Abdillah Mustari, M.Ag.** dan **Dr. Achmad Musyahid Idrus, M.,Ag.** selaku Ketua dan Sekertaris Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum yang telah memberi kemudahan administrative dalam proses penyusunan skripsi ini.
5. **Dr. Darsul Puyu, M.Ag,** selaku Dosen Pembimbing I dan **Irfan, S.Ag, M.Ag,** sebagai Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan tenaga dan waktunya guna membimbing dan memberikan pengarahan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terwujud dan selesai sesuai target.
6. Kepada Bapak/Ibu Dosen beserta seluruh civitas akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, penyusun mengucapkan banyak terima kasih atas ilmu,wawasan dan pengalaman yang telah diberikan.
7. Kepada Ketua Pengadilan Agama Barru **Drs. H. Gunawan, MH** beserta staf, dan para Hakim. Penulis ucapakan banyak terima kasih atas partisipasi dan bantuaanya.
8. Sahabat-sahabatku tercinta khususnya Penunggu Hujan, **Risnawati, Syahril Akbar, Purwagil Abdillah, Bungawati,** dan **Rahmatullah.** Terimah kasih atas

kebersamaanya selama ini. Semoga tercapai semua cita-cita kita. Persahabatan itu tidak berujung dengan kebubaran, persahabatn itu sampai selamanya.

9. Terima kasih buat **Suardi** dan teman-teman perjuangan dikampus **Nurasma Hudong, Musdalifah, Fitriani, dan Nurmila Sari** yang selalu memberi semangat, selalu mendo'akan dan menghibur dikala penulis lelah dalam menyusun skripsi.
10. Teman-teman seperjuangan di Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum terkhusus Angkatan 2013 “ARBITER” Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar. Terima kasih atas kebersamaanya, dukungan moril, kekompakan selama menuntut ilmu, semoga kebersamaan manis ini akan senantiasa terkenang sepanjang masa.

Semoga amal baik dan segala bantuan yang telah diberikan kepada penyusun mendapatkan balasan dari Allah swt. Dan tidak lupa penyusun mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Samata, 4 Mei 2017

Penyusun

Astria Ningsi

NIM: 10400113056

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
ABSTRAK.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	4
C. Rumusan Masalah	7
D. Kajian Pustaka	7
E. Tujuan dan Kegunaan	9
BAB II TINJAUAN TEORITIS	
A. Pengertian Lemah Syahwat/Impotensi.....	10
B. Sebab-sebab Lemah Syahwat/Impotensi	14
C. Pengertian Perceraian	15
D. Alasan-alasan Terjadinya Perceraian	32
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	39
B. Pendekatan Penelitian	39

C. Sumber Data	39
D. Metode Pengumpulan Data	40
E. Instrumen Penelitian	41
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	42
G. Pengujian Keabsahan Data	43
 BAB IV LEMAH SYAHWAT SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN	
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PA BARRU) ATAS	
PUTUSAN PERKARA NO.368/ Pdt.G/2015/PA. Br.	
A. Sekilas Tentang Pengadilan Agama Barru	44
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Upaya Pembuktian Hakim PA Barru Lemah Syahwat sebagai Alasan Perceraian.....	52
C. Tinjauan Syariat Islam terhadap Pertimbangan Hukum yang Digunakan oleh Hakim dalam Memutuskan Perkara Perceraian	60
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
KEPUSTAKAAN	69
LAMPIRAN-LAMPIRAN	72
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	85

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut :

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	ṡ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof

ى	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	damamah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	fathah dan yā	Ai	a dan i
اُو	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كيف : kaifa

هول : haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ... / اِ...	Fathah dan alif atau yā	Ā	a dan garis di atas
ي	Kasrah dan yā	Ī	i dan garis di atas

و	ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas
---	----------------	---	---------------------

Contoh:

مات : māta

رمى : ramā

قليل : qīla

يموت : yamūtu

4. *Tā marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah (t). sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

روضة الاطفال : raudah al-atfāl

المدينة الفاضلة : al-madīnah al-fāḍilah

الحكمة : raudah al-atfāl

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

ربنا : rabbanā

نجينا : najjainā

الحق : al-ḥaqq

نعم : nu''ima

عدو : ‘duwwun

Jika huruf ع ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (□—), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī.

Contoh:

علي : ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عربي : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsyah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشمس : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

الزلازة : al-zalzalah (az-zalzalah)

الفلسفة : al-falsafah

البلاد : al- bilādu

7. Hamzah.

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تامرون : ta’murūna

النوع : al-nau’

شيء : syai’un

امرت : umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari al-Qur’ān), Alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī Zilāl al-Qur’ān
Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. *Lafz al-jalālah (الله)*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍā ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دين الله dīnullāh با الله billāh

Adapun *tā’ marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf (t). contoh:

في رحمة الله hum fī raḥmatillāh

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf capital, misalnya, digunakan untuk menulis huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap dengan huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi’a linnāsi lallaẓī bi bakkata mubārakan

Syahrū Ramaḍān al-laẓī unẓila fih al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

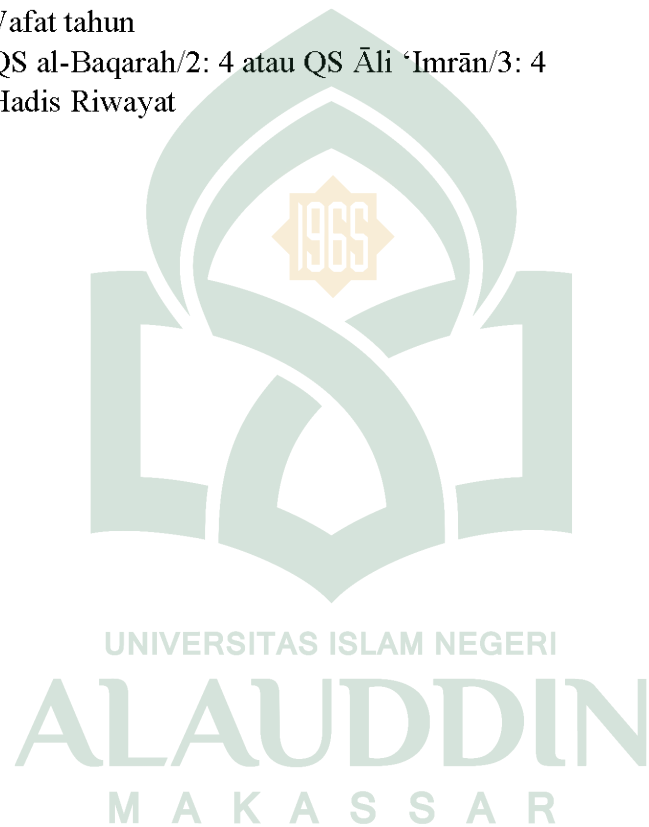
Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū).

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	: subhānahū wa ta'ālā
saw.	: ṣallallāhu 'alaihi wa sallam
H	: Hijrah
M	: Masehi
SM	: Sebelum Masehi
L	: Lahir Tahun (untuk Orang yang masih hidup saja)
w.	: Wafat tahun
QS.../...: 4	: QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli 'Imrān/3: 4
HR	: Hadis Riwayat



ABSTRAK

Nama : Astria Ningsi

NIM : 10400113056

**Judul : Lemah Syahwat Sebagai Alasan Perceraian Perspektif Hukum Islam
(Studi Kasus PA Barru Atas Putusan Perkara Nomor
368/Pdt.G/2015/PA.Br.)**

Pokok masalah penelitian ini adalah Bagaimana Alasan Lemah syahwat sebagai penyebab perceraian ditinjau oleh hukum Islam (Studi Kasus di PA Barru). Kemudian dijabarkan dalam submasalah atau pertanyaan peneliti, yaitu: 1). Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap upaya pembuktian Hakim pengadilan Agama Barru terhadap lemah syahwat sebagai alasan perceraian?, 2). Bagaimana tinjauan Syariat Islam terhadap pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim dalam memutuskan perkara perceraian dengan alasan lemah syahwat?

Penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif (*Field Research*) yaitu menghimpun data dengan mengadakan wawancara langsung tentang Lemah syahwat sebagai alasan perceraian perspektif hukum Islam melalui penelitian di Pengadilan Agama Barru dan meneliti atas putusan nomor perkara 368/Pdt.G/2015/PA.Br. selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Lalu, teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, terjawab bahwa tinjauan hukum islam terhadap upaya pembuktian hakim terhadap lemah syahwat sebagai alasan perceraian yaitu melalui jalan persaksian dan pengakuan tersebut yang sejalan dengan dalil gugatan penggugat dijadikan persangkaan sebagai dasar persangkaan majelis Hakim bahwa rumah tangga penggugat tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan yang disebabkan tergugat menderita penyakit gula yang menyebabkan tergugat lemah syahwat. Menurut pandangan hukum Islam keduanya mempunyai kedudukan yang sama, Namun atas putusan perkara No.368/Pdt.G/2015/PA.Br. tergugat tidak menghadiri persidangan hingga diputuskannya kasus tersebut, maka ketidak hadirannya itu tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan penggugat. Yang selanjutnya tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan Hakim yaitu Majelis Hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasehati penggugat agar mau mempertahankan rumah tangganya, tetapi usaha tersebut tidak berhasil hingga putusan dijatuhkan. Sebagaimana dalam kaidah fiqih kemudharatan itu dapat dihilangkan. Tinjau hukum Islam Hakim lebih mengutamakan kemaslahatan bagi para pihak.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Islam adalah peraturan yang di rumuskan dengan merujuk kepada wahyu Allah (Alquran) dan sunnah Rasul tentang tingkah laku mukallaf yang diakui dan diyakini serta mengikat bagi semua pemeluk Islam.¹ Dengan demikian, secara garis besar hukum Islam terbagi atas dua dimensi, yaitu *pertama*, dimensi ibadah yang bertujuan untuk mengatur hubungan antar manusia dengan Allah swt. Dalam Al-Qu'ran, dimensi ibadah dijelaskan secara global yang selanjutnya dijelaskan secara rinci dalam sunnah Rasul, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan maupun *taqrir*. *Kedua*, dimensi muamalah yang mengatur hubungan antara sesama manusia, termaksud didalam hal pernikahan. Manusia sebagai makhluk hidup secara esensial memiliki kelebihan dari makhluk lain, sehingga manusia sebagai subyek hukum agama dimana perkawinan merupakan sunnatullah menjadi sangat penting.

Ikatan pernikahan merupakan unsur pokok dalam pembentukan keluarga yang harmonis dan penuh rasa cinta kasih, maka dalam pelaksanaan pernikahan tersebut, diperlukan norma hukum yang mengatur. Penerapan norma hukum dalam pelaksanaan pernikahan terutama diperlukan dalam rangka mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga, guna membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Allah swt., berfirman dalam QS. Adz-Dzariyaat/51 : 49.

¹Lihat, Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), h. 3.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahannya :

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.²

Kalimat (*Wa min kulli syai'in kholaqnaa zaujaini la'allakum tazakkaruun*)

Dan segala sesuatu baik makhluk hidup maupun mati telah kami ciptakan berpasang-pasangan agar mereka saling melengkapi supaya kamu mengingat bahwa hanya Allah Yang Maha Esa dan hanya Dia yang Maha Esa.³

Tujuan pernikahan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan yang lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa”.

Tujuan perkawinan secara rinci dapat dikemukakan sebagai berikut: melaksanakan libido seksualitas, memperoleh keturunan, memperoleh yang soleh, memperoleh kebahagiaan dan ketentraman, mengikuti sunnah nabi, menjalankan perintah Allah swt. dan untuk bertaqwa.⁴

Namun pada hakekatnya dalam perkawinan selalu terdapat lika-liku yang dapat menyebabkan ikatan perkawinan menjadi renggang seiring adanya perbedaan-

²Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Syamil Qur'an, 2012), h. 522.

³Lihat, M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 350.

⁴Lihat, Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pusaka Setia, 1999), h. 18.

perbedaan dan permasalahan-permasalahan yang timbul setelah perkawinan berlangsung. Adanya perbedaan dalam memilih pasangan suami isteri yang tidak sekuflu' (setara) baik dalam harta, status, keturunan maupun agama sering kali menjadi penyebab terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga.⁵

Pada dasarnya suatu perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Perceraian hanya dibenarkan penggunaanya dalam keadaan darurat untuk tidak menimbulkan mudharat yang lebih besar, karena itu perceraian adalah pintu daruratnya perkawinan guna keselamatan bersama.

Agama Islam membolehkan adanya perceraian, tetapi hal ini bukan berarti Islam menyukai terjadinya perceraian dalam suatu perkawinan. Bagaimanapun juga perceraian merupakan perbuatan yang tidak disukai oleh Allah swt. Salah satu penyebab perceraian dalam rumah tangga adalah karena salah satu pihak telah meninggalkan kewajibannya. Hal ini banyak sekali terjadi, karena hak dan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga tidak dijalankan dengan semestinya untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan tentram.

Tidak mudah untuk membentuk keluarga yang damai, aman, bahagia, dan sejahtera. Diperlukan pengorbanan serta tanggungjawab dari masing-masing pihak dalam menjalankan peran dalam keluarga. Rasa cinta, hormat, setia, saling menghargai dan lain sebagainya merupakan hal wajib yang perlu dibina baik suami maupun isteri. Dengan mengetahui dan memahami hak dan kewajiban suami isteri

⁵Lihat, A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk* (Cet. II: Bandung: Al-Bayan, 1995), h. 43.

yang baik diharapkan dapat mempermudah kehidupan keluarga berdasarkan ajaran agama dan hukum yang berlaku.

Adapun tentang hak dan kewajiban suami isteri menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tercantum pada Pasal 30 dan 31. Dalam Pasal 30 dinyatakan bahwa: suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi dasar dan susunan masyarakat. Dalam Pasal 31 dinyatakan: hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan dan pergaulan hidup bersama masyarakat, masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum, suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.⁶

Dari penjelasan tentang hak dan kewajiban suami isteri, salah satu hak dan kewajiban suami isteri sebagai konsekuensi dari pernikahannya adalah adanya pemenuhan nafkah lahir batin, bila diartikan nafkah berarti biaya, belanja, pengeluaran uang. Dalam istilah fiqih nafkah adalah suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang atau pihak yang berhak menerimanya atau pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.

Nafkah batin ialah kebutuhan biologis yang merupakan buah dari pernikahan. Kebutuhan biologis ini sangat penting bagi kebutuhan dan keharmonisan rumah tangga, karena tujuan dari pernikahan itu sendiri diantaranya ialah agar dapat meredam nafsu dan menjaga kemaluan dari hal-hal tercela.

⁶Lihat, Sabri Samin dan Andi Narmaya Aroeng, *Fikih II* (Makassar: Alauddin Press, 2010), h. 112.

Allah berfirman dalam QS. Ar-Rum/30: 21.

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahannya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁷

Dengan demikian jelas bahwa Islam benar-benar mengatur nafkah lahir batin dengan sedemikian rupa agar semua pasangan suami isteri mampu memenuhi segala kebutuhan, baik secara fisiologis maupun psikologisnya dengan cara yang dibenarkan agama. namun demikian tidak semua laki-laki yang sudah menikah mampu memberikan keturunan pada isterinya. ketidak mampuan laki-laki memberikan keturunan pada isterinya sehingga banyaknya isteri menggugat cerai pada suaminya, dikarenakan si suami mengalami masalah lemah syahwat atau tidak bisa menafkahi isterinya secara batin.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti hanya akan berfokus pada lemah syahwat sebagai alasan perceraian dengan meneliti kasus di Pengadilan Agama Barru terhadap putusan perkara nomor 368/Pdt.G/2015/PA.Br.

⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 406.

2. Deskripsi Fokus

Agar tidak dapat terjadi salah penafsiran terhadap judul yang dimaksud, maka penulis menjelaskan beberapa variabel sebagai berikut:

Lemah syahwat terdiri dari dua kata yaitu:

Lemah adalah tidak kuat, tidak bertenaga, tidak keras.⁸ Sedangkan Syahwat ialah keberahian, nafsu atau kegemaran bersetubuh.⁹

Dengan demikian yang dimaksud lemah syahwat adalah tidak berdayanya kemampuan pasangan suami isteri dalam melakukan hubungan seksual.

Perceraian adalah perpisahan, perihal bercerai (antara suami isteri), perpecahan.¹⁰

Hukum Islam Menurut Hasby Ash Shiddieqy mengemukakan bahwa hukum Islam adalah hukum-hukum yang bersifat umum yang dapat diterapkan dalam perkembangan hukum Islam menurut situasi dan kondisi masyarakat dan massa.¹¹ Selain itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan bahwa hukum Islam ialah peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur'an dan hadis.¹²

⁸W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* Edisi III (Cet. II; Jakarta: PT Balai Pustaka, 2003), h. 685.

⁹W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, h. 1170.

¹⁰Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 209.

¹¹Lihat, Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1990), h. 44.

¹² Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka), h. 36.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan gambaran dan uraian diatas maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana alasan lemah syahwat sebagai penyebab perceraian ditinjau oleh hukum Islam (Studi Kasus di PA Barru)”.

Bertitik dari pokok masalah, penulis mencoba merumuskan permasalahan sekaligus merupakan pembahasan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana penyebab dan indikasi lemah syahwat ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap upaya pembuktian hakim Pengadilan Agama Barru terhadap lemah syahwat sebagai alasan perceraian ?
3. Bagaimana tinjauan Syariat Islam terhadap pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara perceraian dengan alasan lemah syahwat?

D. Kajian Pustaka/ Penelitian Terdahulu

Untuk memperoleh gambaran yang pasti terhadap posisi penelitian ini, diantara karya-karya yang ada, berikut ini akan penulis ilustrasikan tentang penelitian-penelitian yang sudah ada dan berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti yaitu sebagai berikut:

1. Slamet Abidin dan Aminuddin dalam bukunya, *Fiqh Munakahat* membahas tentang pengertian perkwinan, prinsip-prinsipnya, peminangan, akad, larangan perkawinan, talak, poligami, dan lain-lain.

2. Ahmad Rofiq dalam bukunya, *Hukum Islam di Indonesia* membahas hukum Islam dan mengatur tentang hubungan perseorangan dan kekeluargaan di Indonesia.
3. Sabri Samin dan Andi Narmaya Aroeng dalam bukunya, *Fiqih II* membahas tentang pernikahan, mahar, wali dan saksi dalam pernikahan, hak dan kewajiban suami isteri, nafkah keluarga, kewarisan, talak, rujuk, dan kasus-kasus kewarisan.
4. M. Tahir Maloko dalam bukunya, *Perceraian dan Akibat Hukum dalam Kehidupan* membahas tentang perceraian dan akibat Hukum.
5. Dadang Hawari dalam bukunya, *Al-qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa* membahas tentang kesehatan jiwa baik dalam Al-Qur'an maupun dalam ilmu kedokteran jiwa.

Adapun penelitian-penelitian serupa atau terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini antara lain:

1. Dalam skripsi yang disusun oleh Muh. Haerul Huluk, dengan judul “Perceraian karena Riddah (Studi kasus di Pengadilan Agama Maros Tahun 2010-2014)”. Penelitian ini menyinggung tentang perceraian karena beda agama.
2. Dalam skripsi lain yang disusun oleh Muhammad Ilham, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkara Perceraian Akibat Pelanggaran Taklik Talak di Pengadilan Agama Bima”. Penelitian ini lebih banyak menjelaskan tentang pelanggaran talik talak dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara.

Dengan demikian, setelah dilakukan penelusuran belum ditemukan hasil penelitian yang serupa dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, artinya masalah ini sama sekali belum pernah diteliti sebelumnya.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini tentunya tidak akan menyimpang dari apa yang untuk mengetahui indikasi dari lemah syahwat.
- b. Untuk mengetahui upaya pembuktian hakim dalam memutuskan perkara.
- c. Untuk mengetahui pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara perceraian dalam syariat Islam.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang ingin dicapai penulis adalah sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsi pemikiran bagi disiplin ilmu secara umum dan sekurang-kurangnya bermanfaat.
- b. Sebagai bahan wacana dan diskusi bagi para mahasiswa
- c. Dapat memberikan informasi tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Lemah Syahwat

1. Pengertian Lemah Syahwat/Impotensi

Kata impotensi ini lebih identik dengan lemah syahwat, yang berarti ketidakmampuan seorang pria melakukan ereksi pada penisnya. Tapi, definisi impoten sendiri masih belum jelas benar. Menurut Dr. Anton Indracaya, kata impoten sudah melebar, selain diartikan tidak mampu ereksi, impoten biasa juga diartikan sebagai ejakulasi dini atau tidak bias mencapai orgasme.¹

Impotensi adalah ketidakmampuan alat kelamin pria untuk ereksi, sehingga yang bersangkutan tidak dapat melakukan kewajiban sebagaimana mestinya hubungan suami isteri.² Penyakit lemah syahwat ini akan berdampak buruk pada kelangsungan kehidupan seksual, karena akan kurang mendapatkan kenikmatan dalam berogasme dan kepuasan berhubungan seksual dengan pasangan akan menurun. Penyakit lemah syahwat ini memang merupakan bagian dari gangguan disfungsi ereksi yang awalnya mungkin pernah mengalami ejakulasi dini.

2. Jenis-jenis Lemah Syahwat/Impotensi

Masalah impoten cukup bervariasi. Seorang suami mungkin mendapatkan ereksi selama cumbuan awal, tetapi zakarnya menjadi lemas sewaktu ia mengakhirinya atau pada saat usaha persenggamaan sebenarnya. Mungkin juga,

¹Lihat, Muhammad Abdul Ghoffar, *Menyikapi Tingkah Laku Suami* (Cet. I; Jakarta: Almahira, 2006), h. 300.

²Dadang Hawari, *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), h. 696.

suami mampu memasukan zakarnya ke dalam vagina isterinya tetapi, setelah beberapa kali gerakan keluar-masuk, ia menjadi lemas, dan zakarnya segera tergelincir keluar dari vagina isterinya.³

Impotensi ada yang disebut absolute (total, sama sekali tidak dapat “ereksi”) dan ada yang disebut dengan impotensi relatif. Yang disebut dengan impotensi relatif ialah impotensi yang terjadi sesudah ereksi, artinya hilangnya ketegangan alat kelamin pria sesudah yang bersangkutan mengalami ejakulasi. Pada waktu seseorang melakukan hubungan suami isteri, alat kelaminnya menegang (ereksi) dan beberapa saat kemudian ia mengalami ejakulasi. Setelah selesai ejakulasi, maka alat kelamin itu dengan sendirinya “tertidur”, tidak mampu untuk tegang terus, dan untuk kembali “bangun” memerlukan waktu sekitar setengah sampai satu jam. Periode ini yaitu waktu dari alat kelamin sesudah ejakulasi hingga “bangun” kembali, dinamakan phase impotensi relatif.

Mekanisme ini adalah fisiologi normal, sebab alat kelamin pria tidak dapat terus menerus menegang tanpa batas waktu. Phase istirahat ini gunanya untuk memberi peluang bagi aliran darah berjalan normal kembali, sebab pada waktu terjadinya ereksi pembuluh-pembuluh darah pada batang alat kelamin itu penuh dengan darah yang tersumbat dan mengumpul sehingga menjadikan alat kelamin itu membesar dan menegang.⁴

³Nina Surtiretna, *Bimbingan Seks Suami Isteri*, (Bandung : PT Remaja Roskarya, 2004). h. 127.

⁴Dadang Hawari, *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, h. 697.

3. Cara Penyembuhan Lemah Syahwat/Impotensi

Masalah impotensi hanya bisa diketahui secara tepat oleh salah seorang dari suami (yang menderita) atau isterinya, tidak oleh orang lain. Jadi, yang paling mengetahui hal ini adalah isterinya atau suaminya. Dokter pun tidak akan mengetahuinya secara persis. Oleh karena itu, keluhan yang disampaikan merupakan keluhan yang sifatnya sangat pribadi yaitu keluhan antara suami-isteri. Terkadang pasien dengan penyakit lemah syahwat putus asa setelah berobat kesana sini, akan tetapi terkadang lupa dengan menempuh sebab-sebab syar'i. misalnya berdoa, berobat dengan sedekah dan berobat dengan Al-Qur'an.

Banyak yang mengira Al-Qur'an hanyalah obat hati dan obat kerasukan jin dan setan, akan tetapi Al-Qur'an adalah obat untuk penyakit jasmani dan hati.⁵ Allah Ta'ala berfirman dalam QS. Al-Isra/17 : 82.

وَنُزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا

Terjemahnya:

Dan Kami turunkan dari Al-Qur'an suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al-Qur'an itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian.⁶

Suatu pertolongan Psikiatrik dapat menolong mereka yang mempunyai motivasi untuk disembuhkan dari keluhan-keluhan impotensi/lemah syahwat. Secara garis besar pengobatan yang diberikan, ialah:

a. Mencari latar belakang psikologis;

⁵Copyright ©2006, *Mengobati Lemah Syahwat Dengan Al-Qur'an*.
[http://caraterbaikmengobatipenyakit.blogspot.co.id/2015/11/mengobati-lemah-syahwat-dengan al-quran.html?m=1](http://caraterbaikmengobatipenyakit.blogspot.co.id/2015/11/mengobati-lemah-syahwat-dengan-al-quran.html?m=1), 28 April 2017.

⁶Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Syamil Qur'an, 2012), h. 290.

- b. Memulihkan keyakinan diri (*self confidence*);
- c. Menghilangkan rasa rendah diri (*inferiority complex*);
- d. Mengetahui anatomi dan fisiologi alat-alat kelamin dan hubungan intim suami isteri;
- e. Menjalankan latihan-latihan sesuai petunjuk dokter;
- f. Cara hidup sehat dan bebas dari stress;
- g. Makan obat-obatan sebagai pelengkap atau penunjang.

Adapun pengobatan yang disebabkan karena gangguan syaraf neuropati atau akibat kencing manis, dapat dibedakan dalam dua hal yaitu secara umum dan tindakan bedah. Secara umum misalnya:

- a. Memperbaiki keadaan umum fisik dengan kata lain stamina jasmani dipulihkan dan dipertinggi;
- b. Pengobatan terhadap penyakit kencing manisnya itu sendiri, Dimana kadar gula dalam darah harus dinormalkan;
- c. Penggunaan hormon (*testosteron*) hendaknya dihindarkan, sebab hormon ini membangkitkan libido (*birahi*) namun tidak memperbaiki daya ereksi.

Secara tindakan bedah dengan memasukkan suatu protetis penis. Tindakan bedah ini sudah banyak dilakukan diluar negeri, dan menurut penelitian yang pernah dilakukan terhadap para penderita yang mendapatkan “*Penile Prothesis*” ini, ternyata derajat kepuasan penderita 81% sedangkan pada pasangan mereka 83%. Penderita dapat melakukan aktivitas seksualnya sebagaimana bisa.⁷

⁷ Dadang Hawari, *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), h. 701-703.

B. *Sebab-sebab Lemah Syahwat/Impotensi*

Sebetulnya banyak faktor yang melatar belakangi terjadinya impotensi atau lemah syahwat ini, dari masalah kejiwaan sampai penyakit. Diluar faktor psikologi/kejiwaan merupakan 5% dari keseluruhan kasus. Sebagai contoh misalnya:

- a. Seseorang yang sudah menjalani oprasi kelenjar prostat pada orang tua, dapat timbul komplikasi impotensi;
- b. Penyakit-penyakit fisik lain yang melemahkan kondisi fisik secara umum;
- c. Pada orang tua yang memasuki masa menopause, karena fungsi kelenjar-kelenjar alat kelamin mulai mundur :
- d. Pemakaian beberapa obat tertentu (misalnya obat-obat penenang).⁸

Seorang suami yang pernah melihat langsung proses persalinan isterinya, biasa mengalami trauma yang mengakibatkan penisnya tidak mampu ereksi. Atau orang yang menderita penyakit gula (*diabetes*) juga bias mengalami lemah syahwat. Tapi jika kadar gula darahnya bias dikontrol dan tidak dibarengi faktor kejiwaan, maka tidak akan sampai terjadi lemah syahwat atau impotensi.

Biasa juga impotensi ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan pengertian. Banyak pria yang takut tidak mempunyai keturunan dan tidak mampu ereksi karena mitos-mitos tertentu yang tidak beralasan. Misalnya, memakan terong bias menyebabkan kemandulan dan tidak mampu ereksi, padahal tidak ada yang salah dengan terong.⁹

⁸Dadang Hawari, *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, h. 702.

⁹Lihat, Muhammad Abdul Ghoffar, *Menyikapi Tingkah Laku Suami*, h. 300-301.

C. Perceraian

1. Pengertian perceraian

Kata cerai adalah merupakan kata yang sering kali didengar di tengah-tengah masyarakat. Ungkapan itu muncul sebagai hubungan dari adanya suatu perkawinan yang pernah dilaksanakan. Dengan demikian, dalam membahas masalah perkawinan para ahli hukum sering kali menghubungkan dengan persoalan perceraian, karena perceraian tidak akan muncul atau timbul tanpa adanya perkawinan. Cerai tersebut merupakan kata yang dikenal dalam kamus Bahasa Indonesia dan kata itu digunakan dalam pembahasan umum yang berhubungan dengan masalah perkawinan. Sementara dalam kitab-kitab fikih mempergunakan istilah *thalaq* yang juga dimaksud adalah cerai perkawinan.¹⁰

Perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak dalam perkawinan. Menurut pasal 208 KHUper menjelaskan bahwa perceraian atas persetujuan suami isteri tidak diperkenankan. Perceraian adalah berakhirnya perkawinan yang telah dibina oleh pasangan suami isteri yang disebabkan oleh beberapa hal seperti kematian dan atas keputusan pengadilan.

Menurut Subekti mengatakan perceraian adalah penghapusan perkawinan tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.¹¹ Apabila perselisihan antara suami isteri tidak juga redah, dan rujuk (berdamai kembali) tidak dapat ditempuh, maka perceraian adalah cara yang menyakitkan yang harus dijalani.

¹⁰Lihat, M.Thahir Maloko, *Perceraian dan Akibat Hukum dalam Kehidupan* (Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 11.

¹¹Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 1987), h. 42.

Perceraian dalam istilah ahli fikih disebut “*Thalaq*”. *Thalaq* terambil dari kata “*ithlaq*” yang menurut bahasa artinya “melepaskan atau meninggalkan”. Menurut istilah syara’, *thalaq* yaitu melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami isteri.¹² *Thalaq* sebagaimana yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya perceraian tersebut mengakibatkan hubungan yang telah terjalin selama ini melalui perkawinan menjadi terhenti dan ikatan yang kokoh itu putus.

Menurut Abdurrahman Ghazaly, *thalaq* adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu isteri tidak lagi halal bagi suaminya, dan ini terjadi dalam hal *thalaq ba’in*, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya jumlah *thalaq* bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah *thalaq* yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak talak itu, yaitu terjadi dalam talak *raj’i*.¹³

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 117 menjelaskan talak merupakan salah satu segi yang menyebabkan putusnya perkawinan. Apabila mengajukan perceraian itu suami, maka disebut “cerai talak”, dan apabila yang mengajukan itu si isteri, maka disebut “cerai gugat”.

2. Dasar Hukum perceraian

Perceraian berarti perpisahan hubungan suami isteri sebagai pertanda bubarnya hubungan rumah tangga (ikatan perkawinan) antara suami isteri. Padahal

¹²Lihat, Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung: Al-Ma’arif, 1990), h. 9.

¹³Lihat, Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Cet. I; Jakarta: Prenda Media, 2003), h. 192.

perbuatan ini adalah suatu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah swt. Adapun dasar hukum perceraian dapat dilihat dalam Al-Qur'an dan hadis.

Dasar hukum perceraian dapat dilihat dalam surah al-Baqarah ayat 229-230 dan at-Thalaq ayat 1-2.

a. Surah al-Baqarah/2:229

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكِ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنِ ۖ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا
ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahnya:

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka. Kecuali keduanya (suami dan isteri) khawatir tidak mampu enjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh isteri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itu orang-orang zalim.¹⁴

b. Surah at-Thalaq/65:1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ
رَبَّكُمْ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ
وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ
بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

¹⁴Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 36.

Terjemahnya:

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.¹⁵

Disini penulis hanya mencantumkan surah al-Baqarah/2:229 dan at-Thalaq/65:1 namun menjelaskan semua maksud isi surah al-Baqarah ayat 229-230 dan at-Talak ayat 1-2. Adapun dalam Surah al-Baqarah menjelaskan bahwa talak *raj'i* itu hanya berlaku dua kali. Kalau talak sudah tiga kali, tidak boleh rujuk lagi dinamakan talak *ba'in*. Selama masih dalam talak satu atau talak dua, suami boleh rujuk dengan baik-baik, atau tetap bercerai dengan baik pula, yang dimaksud dengan cara yang baik ialah selama dalam *iddah* perempuan masih dapat belanja, kemudian diaakan pembagian harta perceraian dengan cara itu perempuan sudah diberikan haknya menurut semestinya. Kalau sudah benar-benar cerai suami tidak boleh mengambil apa yang sudah diberikan kepada isterinya, apabila suami isteri itu dikhawatirkan tidak dapat menjalankan ketentuan-ketentuan Allah, jika ini yang disebabkan oleh suami maka ia tidak dibenarkan mengambil kembali apa yang telah diberikan kepada isterinya, tetapi jika hal ini disebabkan isteri, maka isteri boleh memberikan kembali harta yang telah diberikan oleh suaminya kepadanya untuk melepas dirinya dari ikatan perkawinan.¹⁶

¹⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 558.

¹⁶Pendidikan Islam Copyright©2007, *Pembahasan Lengkap mengenai perceraian/Talak dalam islam*. <http://www.masuk-islam.com/pembahasan-lengkap-mengenai-perceraiantalak-dalam-islam-pengertian-cerai-hukum-cerai-syarat-rukun-dalil-ceraimasa-iddah-macam-macam-cerai-dll.html>. 21 Mei 2017.

Dapat dipahami bahwa Islam menghargai nilai cinta dan kasih sayang dalam ikatan perkawinan dalam kehidupan rumah tangga dengan memberi kesempatan kepada suami isteri yang bercerai untuk kembali kepada isterinya sampai dua kali, Ayat diatas juga menjelaskan tentang masa *iddah* seorang perempuan (isteri) ditetapkan selama tiga kali *quru'*. Kata *quru'* dalam ayat tersebut diperselisihkan oleh para ulama. Perempuan (isteri) yang sudah tidak haid lagi, baik karena sakit karena usia, masa *iddah*-nya selama tiga bulan, perempuan yang sedang hamil sampai ia melahirkan sebagaimana yang terdapat dalam QS. At-Thalaq/65;4, selanjutnya wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, maka masa *iddah*-nya selama empat bulan sepuluh hari sebagaimana yang terdapat dalam QS. Al-Baqrah/2;234.

Selanjutnya QS. At-Thalaq/65;1-2 menjelaskan tentang menceraikan isteri pada masa yang telah ditentukan yang dikenal dengan istilah talak *sunni* (talak yang sesuai dengan Sunnah Rasulullah saw), yang merupakan kebalikan dari talak *bid'I* (talak yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah saw). Yang dimaksud talak *sunni* ialah *Thalaq* yang diucapkan ketika isteri dalam keadaan suci dan belum dicampuri pada masa suci tersebut atau dalam keadaan hamil, talak *bid'I* adalah talak yang diucapkan suami pada masa isteri dalam haid atau dalam keadaan suci tetapi sudah dicampuri pada masa suci tersebut.¹⁷

Dasar pelaksanaan *thalaq* atau perceraian di Indonesia adalah Al-Qur'an, hadis dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang didalamnya disertakan pembahasan perceraian yaitu pasal 39 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa:

¹⁷Lihat, M Tahir Maloko, *Perceraian dan Akibat Hukum Dalam Kehidupan*, h. 28.

- 1) Perceraian hanya dapat dilaksanakan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

1. Macam-Macam Perceraian

a. Talak

Kata talak (طلاق) dalam bahasa Arab bermakna mengurai ikatan. Kata yang dipadankan dengan istilah “talak” ini berasal dari kata *ithlaq*, yang artinya melepas dan meninggalkan.

Talak menurut istilah syar’i adalah melepas ikatan pernikahan dan memutus tali perkawinan.¹⁸

Adapun Macam-macam Talak yaitu:

- 1) Talak *sunni*, yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami kepada isterinya yang diperbolehkan atau sesuai dengan ketentuan syara’
- 2) Talak *bid’i*, yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami kepada isterinya yang tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan syara’.
- 3) Talak *raj’i*, suami melafazkan talak satu atau talak dua kepada isterinya. Suami boleh merujuk kembali isterinya ketika masih dalam *iddah*. Jika tempoh *iddah* telah usai, maka suami tidak dibenarkan merujuk melainkan dengan akad nikah baru.

¹⁸Lihat, Syaikh Husain bin ‘Audah al-‘Awaisyah, *Al-Mausuu’ah al-Fiqhiyyah al-musyassarah fii fiqhi kitaab was sunnah al-muthaharah*, ter. Yunus S.T., Zulfan S.Ag dan Husnel Matondang, *Ensiklopedi Fiqih Praktis Menurut Al-qur’an dan As-Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-syafi’i, 2008), h. 247.

4) Talak *ba'in*, yaitu talak dimana suami tidak memiliki hak untuk merujuk isterinya yang telah ditalaknya.

Sedangkan talak ditinjau dari segi hukum positif Indonesia maka talak dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

1) Cerai talak adalah perceraian yang terjadi akibat dijatuhkannya talak oleh seorang suami terhadap isterinya, dimuka sidang pengadilan.¹⁹ Merupakan suatu tindakan suami secara sepihak untuk memutuskan atau menghentikan perkawinan yang sedang berjalan. Cerai talak ini khusus untuk orang yang beragama Islam.

2) Cerai Gugat adalah perceraian yang terjadi akibat adanya gugatan salah satu pihak kepada pengadilan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Adapun yang termasuk cerai gugat dalam lingkungan Pengadilan Agama adalah:

- a) *Fasakh*, yaitu merusak atau membatalkan, ini berarti bahwa perkawinan itu putus atau rusak atas permintaan dari salah satu pihak kepada Hakim Pengadilan Agama
- b) *Syi'qoq*, yaitu perselisihan atau pertengkaran suami isteri yang diselesaikan dua orang hakim, baik dari pihak suami maupun dari pihak isteri.
- c) *Khuluk*, yaitu melepas ikatan perkawinan dengan adanya tebusan dari pihak isteri.
- d) *Ta'lik Talak*, yaitu suatu talak yang digantungkan pada suatu hal yang mungkin terjadi yang telah disebutkan dalam suatu perjanjian yang telah diperjanjikan lebih dulu.²⁰

¹⁹Mulati, *Hukum Perkawinan Islam*, (Tangerang: PT Pustaka Mandiri, 2012), h. 58.

²⁰Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'ala al-Mazhib al-khmsah*, ter. Masykur A. B., *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera, 2009), 451.

b. Khuluk

Khuluk adalah penyerahan harta yang dilakukan oleh isteri untuk menebus dirinya dari (ikatan) suaminya. Percerain dengan cara ini dibolehkan dalam agama Islam dengan disertai beberapa hukum perbedaan dengan talak biasa. *Khuluk* menurut bahasa Arab adalah menanggalkan pakaian, artinya melepaskan kekuasaannya sebagai suami dan memberikan kepada isterinya dalam bentuk talak.

c. Fasakh

Fasakh artinya merusak atau melepaskan tali ikatan perkawinan. *Fasakh* dapat terjadi karena sebab yang berkenaan dengan akad nikah atau dengan sebab yang penting setelah berlakunya akad.

d. Zhihar

Zhihar adalah penyerupaan yang dilakukan oleh seorang suami kepada isterinya atau anggota tubuhnya dengan seorang wanita yang haram bagi sang suami, seperti mengatakan kepada sang isteri: “Bagiku kamu seperti punggung ibu saya.”²¹ Apabila seorang suami mengatakan hal seperti itu kepada isterinya, maka laki-laki itu tidak halal lagi mencampuri isterinya sampai dia memerdekakan seorang hamba sahaya (budak). Kemudian apabila dia tidak mamapu, maka dia harus berpuasa dua bulan berturut-turut. Dngan begitu masih tidak mampu pula, maka dia harus memberi makan enam puluh orang miskin.

e. Ila'

Ila' juga merupakan kebiasaan jahiliyya, pihak laki-laki bersumpah pada isterinya sendiri bahwa ia tidak akan menggaulinya lagi dengan menyebut nama

²¹Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Mausu'ah Fiqhi Umar Ibnul Khathab ra*, terj. Abddul Mujieb As, *Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khathab ra*, (Edisi. I. Cet, I: Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), h. 680.

Allah atau menyebut sifat-sifatnya selamanya atau tanpa waktu, lebih dari empat bulan. *Ila'* berisi pelajaran bagi isteri yang bermaksiat dan durkaha kepada suaminya. *Ila'* boleh dilakukan sesuai dengan kebutuhan yakni empat bulan atau kurang, bila melebihi waktu tersebut hukumnya haram dan merupakan kezhaliman karena *ila'* berisi sumpah meninggalkan kewajiban atasnya.²²

f. *Li'an*

Li'an adalah laknat, yaitu sumpah yang didalamnya terdapat pernyataan beredia menerima laknat Allah, apabila yang mengucapkan sumpah itu dusta. Dalam hukum perkawinan, *li'an* merupakan perceraian yang terjadi akibat sumpah suami bahwa isterinya telah melakukan zina. Sumpah *li'an* ini dapat mengakibatkan putusannya perkawinan antara suami dan isteri untuk selama-lamanya.²³

2. Rukun dan Syarat Perceraian

Rukun talak adalah unsur pokok yang harus ada dalam talak. Adapun rukunnya yaitu:

a. Suami.

Suami adalah orang yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkan talak. Untuk sahnya talak, suami yang menjatuhkan talak disyaratkan:

- 1) Berakal. Suami yang gila, hilang akal karena sakit atau rusak syaraf tidak sah menjatuhkan talak.
- 2) Baligh.

²²Mustafa Diibul Bigha, *Fiqih Syafi'i, Terjemah At-Tahdziib*, (Surabaya: Bintang Pelajar, 1984), h. 399.

²³Kamal Muhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 203-204.

- 3) Atas kemauan sendiri. Hal ini dimaksud bahwa kehendak menjatuhkan talak tersebut bukan dipaksa orang lain. Orang yang dipaksa melakukan talak, maka tidak sah.

b. Isteri

Suami hanya berhak menjatuhkan talak terhadap isterinya sendiri, tidak dijatuhkan pada isteri orang lain. Syarat isteri yang ditalak adalah:

- 1) Isteri masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami.
- 2) Kedudukan isteri yang ditalak itu harus berdasarkan akad perkawinan yang sah.

c. *Sighat* talak

Sighat talak adalah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap isterinya yang menunjukkan talak, baik berupa ucapan/lisan, tulisan, isyarat bagi suami tuna wicara ataupun dengan suruhan orang lain.

Jika suami dalam keadaan marah, lalu memukul isterinya dan memulangkan ke rumah orang tuanya, menyerahkan barang-barangnya tanpa disertai pernyataan talak, maka hal itu bukan talak.

d. *Qasdu* (sengaja)

Qasdu (sengaja) Artinya dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya benar-benar untuk talak. Jadi jika salah ucap yang dimaksud tidak untuk talak, dipandang tidak jatuh talak. Misalnya sikap suami ingin mengucap “salak” keliru “talak”, maka itu tidak dianggap jatuh.²⁴

e. Wilayah. Yaitu suami mempunyai wewenang menjatuhkan talak.

²⁴Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 202-203.

3. Akibat Perceraian

Hukum Islam maupun peraturan Perundang-undangan di Indonesia menyatakan bahwa perceraian yang terjadi antara seorang suami dan isteri bukan hanya memutuskan ikatan perkawinan saja, lebih lanjut perceraian juga melahirkan beberapa akibat seperti timbulnya pembagian harta bersama (gemenshap) dan hak pengurusan anak (hadhanah).

a. Harta Bersama

Perceraian yang timbul antara suami dan isteri melainkan akibat, diantaranya adalah pembagian harta bersama. Konsep harta bersama dalam hukum Islam tidak nash yang secara tegas menyebutkan hukum harta bersama baik dalam Al-Qur'an maupun hadis. Di Indonesia, atas dasar adat kebiasaan masyarakat muslim yang mengakui adanya harta bersama setelah terjadinya perceraian sudah menjadi lebih kuat dan berkekuatan hukum fositif, sejaka diregulasi dan diratifikasi, sebagaimana substansi yang telah dituang dalam Pasal 35 ayat (1) ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa:²⁵

Pasal 35

- 1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- 2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Sedangkan dalam hukum Belanda yang terdapat dalam Pasal 119 dan Pasal 126 Burgerlijk Wetboek disebutkan bahwa sejak saat dilangsungkan perkawinan,

²⁵Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Cet II; Jakarta: Kencana), h. 60-61.

maka menurut hukum, terjadilah percampuran harta bersama. Hal ini terjadi selama tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Harta bersama bubar demi hukum dikarenakan kematian, perceraian, pisah meja, ranjang dan karena pemisahan harta yang dituang dalam perjanjian sebelum terjadinya perkawinan dan dalam pasal 127 Bugerlijk Wetboek, setelah bubarnya harata bersama, kekayaan mereka dibagi dua antara suami dan isteri atau antara para pewaris mereka tanpa mempersoalkan dari pihak mana asal barang-barang itu.

b. Pengurusan Anak (Hadhanah)

Perceraian disamping menimbulkan adanya pembagian harta bersama, juga menimbulkan masalah pengurusan anak. Hadhanah merupakan kewajiban bagi kedua orang tua untuk bersama-sama mengasuh dan melindungi anaknya sampai batas umur yang telah ditetapkan, namun hal itu akan sulit terealisasi jika ayah dan ibu terjebak dalam kasus perceraian. Akan timbul masalah siapakah yang berhak atas kewajiban mengasuh anak tersebut. Hukum Islam menyebutkan bahwa apabila terjadi perceraian antara suami dan isteri, maka isterilah yang berhak mengasuh, mendidik dan memelihara anak-anaknya selama anaknya belum mumayyiz. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw kepada seorang isteri yang mengadukan pengurusan anaknya setelah isteri tersebut bercerai dari suaminya. Nabi saw bersabda yang artinya:²⁶

“Kaulah yang lebih berhak mendidik anakmu selama kamu belum kawin dengan orang lain”.

Selain dua akibat perceraian diatas, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 41 juga menyebutkan akibat dari perceraian yaitu:

²⁶Satria Effendi, *Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Gramedia, 2004), h. 62.

- 1) Baik Ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya;
- 2) Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut membiayai tersebut;
- 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

4. Tata cara Perceraian

Dari ketentuan tentang Perceraian di dalam Undang-Undang No.1 tahun 1989, Undang-Undang No. 1 tahun 1974 serta Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, maka perceraian itu bisa berbentuk cerai talak dan cerai gugat. Adapun tata cara dan prosedurnya dapat dibedakan menjadi:

a. Cerai Talak

Di dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama memuat bahwa:

- 1) Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna mengikrarkan ikrar talak.
- 2) Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon,

kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon.

- 3) Dalam hal ini termohon bertempat kediaman di luar negeri, permohonan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon.
- 4) Dalam hal pemohon dan termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya tempat perkawinan mereka berlangsung atau kepada Pengadilan Agama Jakarta pusat.
- 5) Pemohon soal pengasuh anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.

Pasal 67 Undang-Undang Peradilan Agama menyatakan bahwa permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal tersebut memuat:

- a. Nama, umur, dan tempat kediaman pemohon, yaitu suami, dan termohon, yaitu isteri;
- b. Alasan-alasan yang menjadi dasar cerai talak.

Selanjutnya Pemeriksaan oleh Pengadilan sebagaimana pasal 68 yaitu:

- 1) Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat permohonan cerai talak didaftarkan di kepaniteraan.²⁷
- 2) Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan dalam sidang tertutup.

²⁷Undang-Undang, No. 7 Tahun 1989.

pemeriksaan *In Person* atau kuasa, pemeriksaan perkara cerai talak, tidak berbeda dengan pemeriksaan perkara perdata umum, tidak mutlak mesti penggugat atau tergugat *in person* yang menghadiri pemeriksaan di sidang pengadilan. Penggugat atau tergugat dapat diwakili oleh kuasa, asal untuk itu harus didukung oleh surat kuasa khusus. Begitu pula dalam perkara cerai talak, dapat langsung dihadiri pemohon atau termohon *in person*, jika tidak mana dapat menunjukkan wakil sebagai kuasa berdasar surat kuasa.

Kecuali dalam sidang perdamaian, pemohon dan termohon harus datang menghadiri “secara pribadi”. Tidak bisa diwakili oleh kuasa. Demikian ditentukan dalam pasal 82 ayat (2). Ketentuan ini menyimpang dari ketentuan umum hukum acara perdata. Berdasar ketentuan umum, kuasa dapat mewakili kepentingan pihak pemberi kuasa sekalipun dalam sidang perdamaian. Namun kita sadar, sifat kekhususan yang terkandung dalam perkara perceraian sangat melibatkan nilai kemanusiaan dan pribadi.²⁸

Langkah selanjutnya yang telah diatur dalam pasal 70 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dan sebagaimana telah dirinci dalam pasal 16 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menyebutkan:

1. Pengadilan telah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin didamaikan dan telah cukup alasan perceraian maka pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan.
2. Terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) istri dapat mengajukan banding.

²⁸M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, Edisi II, (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 223.

3. Setelah penetapan tersebut memperoleh ketentuan tetap pengadilan menentukan hari sidang menyaksikan ikrar talak, dengan memanggil suami dan isteri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut.
4. Dalam sidang itu, suami atau wakilnya yang diberi kuasa khusus dalam suatu akta otentik untuk mengucapkan ikrar talak yang dihadiri istri atau kuasanya.
5. Jika isteri telah mendapat panggilan secara sah atau patut tetapi tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya, maka suami atau wakilnya dapat mengucapkan ikrar talaq tanpa hadirnya isteri atau wakilnya.
6. Jika suami dalam tenggang waktu 6 bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak tidak datang sendiri atau tidak mengirim wakilnya, meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau patut, maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama.²⁹

Selanjutnya diatur dalam pasal Selanjutnya diatur dalam Pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 yaitu sesaat setelah dilakukan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 16, ketua pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut. Surat keterangan itu dikirimkan kepada pegawai pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian.

Pasal 18 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 menyatakan bahwa perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan.³⁰

b. cerai Gugat

²⁹Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 18.

³⁰Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 18.

Di dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1989 Pasal 73 ayat (1) menyebutkan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.³¹

Dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, maka Undang-Undang No. 7 tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam, gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya. Pengadilan tempat mengajukan gugatan perceraian dalam peraturan pemerintah diajukan di Pengadilan yang mewilayahi tempat tergugat, maka kalau Undang-Undang No. 7 tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam di pengadilan yang mewilayahi tempat kediaman penggugat.

Mengenai alat-alat bukti yang menguatkan alasan-alasan diajukan gugatan perceraian hanya Pasal 21 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 menambahkan masalah tempat mengajukan gugatan kaitannya dengan alasan-alasannya.

Adapun yang menyangkut alasan-alasan dan dukungan serta buktinya, dijelaskan dalam Pasal 75, dan 76 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 dan Pasal 133, 134 dan 135 Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 75:

Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan bahwa tergugat mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami-istri, maka Hakim dapat memerintahkan tergugat untuk memeriksakan diri ke dokter

³¹Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 18.

Pasal 76:

- 1). Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri;
- 2). Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami isteri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakam.³²

Namun apabila tidak tercapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup (Pasal 135 KHI, Pasal 33 Peraturan Pemerintah dan Pasal 80 ayat (2) UU PA. Adapun kapan persidangan dimulai sesuai penjelasan dalam Pasal 80 ayat (1) UUPA adalah: “pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh majlis Hakim selambat-lambatnya 30 hari setelah berkas atau surat gugatan perceraian didaftarkan di kepaniteraan”.

Meskipun sidang pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan secara tertutup, putusan pengadilan mengenai gugatan perceraian tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (Pasal 81 ayat 1 UUPA Jo. KHI Pasal 146 ayat 1). Perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap (UU PA Pasal 81 ayat 2 dan Pasal 146 ayat 2 KHI, Pasal 34 Peraturan Pemerintah).

D. Alasan-Alasan terjadinya Perceraian

Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam Undang-Undang Perkawinan untuk menjelaskan perceraian atau berakhirnya hubungan antara

³²Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 75-76 h.

suami-isteri. Putusnya Perkawinan yang diatur dalam pasal 38 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 karena:

- a. Kematian,
- b. Perceraian dan
- c. Atas Keputusan pengadilan

Adapun putusan perkawinan yang diatur dalam peraturan pemerintah:

- 1) Pasal 38 sampai pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
- 2) Pasal 113 sampai pasal 128 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Walaupun Perceraian dibenci terjadi dalam suatu rumah tangga, namun hal ini dilihat sebagai akhir dari suatu ketidak stabilan perkawinan dimana pasangan suami isteri kemudian hidup terpisah karena alasan-alasan tertentu dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku.

Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak dapat melanjutkan kehidupan rumah tangganya dengan rukun sebagai suami isteri. Hal ini sesuai tujuan di undangkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan untuk mempersulit terjadinya perceraian karena perkawinan pada dasarnya untuk selama-lamanya.

Pada dasarnya perceraian tidak dilarang, namun undang-undang menentukan seseorang tidak dengan mudah memutuskan ikatan perkawinan tanpa adanya alasan dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) tersebut ditentukan bahwa alasan-alasan yang dibenarkan untuk melakukan perceraian adalah:

- a. Zina yakni salah satu pihak berbuat zina.

- b. Ditinggalkan dengan sengaja yakni salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
- c. Penghukuman melebihi 5 (lima) tahun yakni salah satu pihak mendapat hukuman penjara melebihi 5 (lima) tahun atau hukuman karena dipersalahkan melakukan sesuatu kejahatan setelah perkawinan berlangsung.
- d. Penganiayaan berat atau membahayakan jiwa (pasal 209 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) yakni salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.³³

Selanjutnya, pasal 19 Peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 juga menambahkan 2 alasan, yakni:

- a. Salah satu mendapat cacat badan/penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
- b. Antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan/pertengkaran yang tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangganya.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, maka alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar gugatan cerai bagi isteri terhadap suaminya, antara lain:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, perselingkuhan dengan perempuan yang lain dan sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

³³KUH, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*, (Jakarta: Wipress, 2008), h. 394.

3. Salah satu pihak mendapatka hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atas hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak telah melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Berkaitan dengan uraian diatas, masih ada 2 (dua) alasan lagi yang dapat dijadikan alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam, pasal 116 yaitu:

1. Suami telah melanggar *taklik thalaq*;

Taklik talak yang berlaku di Indonesia sebagai talak yang digantungkan adalah perjanjian perkawinan yang mengikat suami pada saat akad nikah sebagai suatu perjanjian perkawinan yang mengikat suami. Taklik talak tersebut didasarkan pada firman Allah QS.An-Nisa/4:128

وَإِنْ أَمْرَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Terjemahannya:

Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu

secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.³⁴

2. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.³⁵

Sehubungan dengan itu berikut dikemukakan beberapa faktor dijadikan alasan-alasan terjadinya perceraian:

1. Faktor Keluarga

Sebuah perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Namun kebahagiaan dan kekalnya suatu keluarga ditentukan oleh beberapa faktor, termaksud faktor keluarga yang menentukan tahap perkawinan yang bermula dari penentuan pasangan atau pemilihan jodoh.³⁶

Akibat dari tindakan penentuan pasangan atau pemilihan psangan berbagai masalah yang muncul setelah pernikahan dilangsungkan, sebagai akibat tidak kecocokan dari kedua pasanagan suami isteri dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Sifat keaslian masing-masing pasangan suami isteri mulai bermunculan sebagai akibat ketidaksenangan dari awal pernikahan menjadi jalan senantiasa membesarkan hal yang pada prinsipnya tidak perlu dibesar-besarkan. Dan lebih itu, pertengkaran dan percekocokan sampai pada tingkat upaya perceraian atau paling tidak rasa tanggung jawab mereka terhadap keluarga semakin berkurang.

Tidak dapat dipungkiri bahwa model perjodohan yang dilakukan oleh orang tua diharapkan akan membawa manfaat terutama sebuah upaya untuk mengangkat

³⁴Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 99.

³⁵Soemiaty, *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan* (Yogyakarta: liberty, 1982), h.116.

³⁶Ibnu Muhalli Abdullah umar, *Menyongsong Hidup Baru Penuh Berkah* (Cet. I; Yogyakarta: Media Insani, 2001), h. 77.

martabat sosial keluarga di masyarakat, namun tidak kurang perkawinan tersebut yang berakibat kurang menguntungkan, seperti perceraian yang juga berdampak bagi keretakan kedua keluarga masing-masing.

2. Faktor Umur

Melaksanakan suatu pernikahan diperlukan persyaratan tertentu dan kesiapan yang cukup bagi kedua calon mempelai seperti kedewasaan fisik dan mental, kesamaan pandangan hidup dan agama serta berbagai aspek lainnya. Persyaratan lain yang lebih penting calon suami isteri harus laksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Hal ini dicapai apabila penundaan usia pernikahan yang disertai dengan usaha-usaha positif dan nyata untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul akibat berbagai faktor yang tidak mendukung.

Kurangnya rasa tanggung jawab yang dimiliki oleh pasangan suami isteri adalah diakibatkan oleh tingkat kedewasaan pada diri mereka. Akibat persoalan kecil seringkali dibesar-besarkan dan pada akhirnya menimbulkan kasus perceraian.

3. Faktor Ekonomi

Hidup dalam kekurangan membutuhkan kesabaran yang besar, banyak orang yang tidak kuasa bertahan dalam kekurangannya, khususnya wanita. Syarat utama untuk menjalani pernikahan adalah mempunyai pekerjaan yang layak dan ekonomi yang cukup. Jika keadaan ekonomi dalam rumah tangga menipis, tentu akan menyebabkan banyak masalah baru sehingga menimbulkan cek-cok antara suami isteri.

4. Faktor Pihak Ketiga.

Sebuah keluarga yang masih didampingi orang tua atau mertua akan terasa kurang mandiri. Ketika orang tua atau mertua terlalu mencampuri kehidupan rumah

tangga anaknya atau menantunya dapat menimbulkan konflik sehingga kehidupan rumah tangga anaknya biasa berantakan yang diakhiri dengan sebuah perceraian.

5. Krisis Moral dan Akhlak

Perceraian juga sering memperoleh landasan berupa krisis moral dan akhlak, yang dapat dilalaikannya tanggung jawab baik oleh suami ataupun isteri, poligami yang tidak sehat, penyaniayaan, pelecehan dan keburukan perilaku lainnya yang dilakukan baik oleh suami ataupun isteri, misal mabuk , berzinah, terlibat tindak kriminalan, bahkan utang piutang. Ini semua dapat menimbulkan konflik rumah tangga yang diakhiri dengan perceraian.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis penelitian dan Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif (*Field Research*) yaitu menghimpun data dengan mengadakan wawancara langsung tentang “Lemah syahwat sebagai alasan perceraian perspektif hukum Islam melalui penelitian di Pengadilan Agama Barru dan meneliti atas putusan nomor perkara 368/Pdt.G/2015/PA.Br”.

Adapun alasan memilih lokasi penelitian ini adalah dikarenakan pada sebelumnya pernah melakukan PPL (Praktek Pengenalan Lapangan) dan penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang lemah syahwat sebagai alasan perceraian.

B. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan yuridis, yaitu suatu metode atau cara yang digunakan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku yang memiliki korelasi dengan masalah yang akan diteliti.¹
2. Pendekatan Syar’I, yaitu pendekatan terhadap Hukum Islam yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

¹Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, edisi refisi (Bandung: Rasdakarya, 2004), h. 26.

1. Data primer

Data Primer adalah sumber data yang dapat memberikan data penelitian secara langsung.² Dalam hal ini berupa informasi dari narasumber, yakni Ketua PA, Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Barru.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok, atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber data yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok.³ Adapun sumber data yang mendukung dan melengkapi sumber data sekunder adalah berupa buku kompilasi hukum Islam, fiqih munakahat, hukum Islam kontemporer, jurnal, website, majalah dan pustaka lain yang berkaitan dengan judul penelitian.

D. Metodologi Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data nanti, teknik yang akan di gunakan yaitu, observasi, interview/wawancara dan dokumentasi. Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan teknik:

1. Observasi

Observasi adalah suatu teknik penelitian yang digunakan oleh penulis dengan jalan turun langsung ke lapangan mengamati objek secara langsung guna mendapatkan data yang lebih jelas. Observasi dimaksudkan untuk mengumpulkan data dengan melihat langsung ke lapangan terhadap objek yang diteliti. Dalam

²Joko P. Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 88.

³Suryadi Suryabarata, *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 85.

pelaksanaan observasi ini penulis menggunakan alat bantuan untuk memperlancar observasi lapangan yaitu buku catatan sehingga seluruh data-data yang diperoleh lapangan melalui observasi ini dapat dicatat.

2. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka, mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan secara mendalam dan detil. Peneliti akan mewawancarai ketua Pengadilan Agama Barru, hakim, panitera.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan bukti dan keterangan seperti foto, kutipan materi dan berbagai bahan referensi lain yang berada di lokasi penelitian dan dibutuhkan untuk memperoleh data yang valid.

E. Instrumen Penelitian

Dalam upaya memperoleh data yang akurat, penulis menggunakan instrument penelitian. Eksistensi instrument dalam suatu penelitian menjadi salah satu unsur penting karena berfungsi sebagai alat bantu atau sarana dalam mengumpulkan data yang dipertanggung jawabkan kebenarannya.

Tolak ukur keberhasilan penelitian juga tergantung pada instrumen yang digunakan. Oleh karena itu untuk penelitian lapangan *field research* yang meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi dibutuhkan kamera, alat perekam, dan alat tulis menulis berupa buku catatan dan pulpen.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Untuk menganalisis data yang terkumpul guna memperoleh kesimpulan yang terkumpul guna memperoleh kesimpulan yang valid, maka digunakan teknik analisis data dengan metode kualitatif.

Adapun teknis dan interpersi data yang digunakan yaitu:

1. Reduksi data (seleksi data)

Reduksi data (seleksi data) yang prosesnya dilakukan sepanjang penelitian berlangsung dalam penulisan. Penulis mengolah data dengan bertolak dari teori untuk mendapatkan kejelasan pada masalah, baik data yang terdapat di lapangan maupun yang terdapat pada kepustakaan. Data dikumpulkan, dipilih secara selektif dan disesuaikan dengan permasalahan yang di rumuskan dalam penelitian.

2. Sajian Data

Sajian data, dengan berusaha menampilkan data yang dikumpulkan. Dalam penyajian data dilakukan secara induktif yakni menguraikan setiap permasalahan penelitian dengan memaparkannya secara umum kemudian menjelaskannya secara spesifik.

3. Penarikan Kesimpulan

Dalam hal ini penulis menarik kesimpulan dan memverifikasi. Langkah terakhir dalam menganalisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, setiap kesimpulan awal masih merupakan kesimpulan sementara yang akan berubah bila diperoleh data baru dalam pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh selama di lapangan diverifikasi selama penelitian

berlangsung dengan cara memikirkan kembali dan meninjau ulang catatan lapangan sehingga terbentuk penegasan kesimpulan.

G. Pengujian Keabsahan Data

1. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Dengan meningkatkan ketekunan maka peneliti dapat direkam secara pasti dan sistematis. Dengan meningkatkan ketekunan maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang ditemukan itu salah atau tidak. Dengan demikian dengan meningkatkan ketekunan maka peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati. Dengan meningkatkan hal ini, dapat meningkatkan kredibilitas data.⁴

2. Menggunakan Bahan Referensi

Yang dimaksud dengan bahan referensi disini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh, data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara sehingga data yang didapat menjadi menjadi kredibel atau lebih dapat dipercaya. Jadi, dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan rekaman wawancara dan foto-foto hasil observasi sebagai bahan referensi.⁵

⁴Sugiono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D.* (Bandung: Alfa Beta 2009), h. 306.

⁵Sugiono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R &*, h. 307.

BAB IV

LEMAH SYAHWAT SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PA BARRU) ATAS PUTUSAN PERKARA NOMOR 368/Pdt.G/2015/PA.Br.

A. Sekilas Tentang Pengadilan Agama Barru

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 Pengadilan Agama Barru Pada tahun 1958 termasuk dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Parepare, dan kemudian pada tahun 1967 Pengadilan Agama Barru baru berdiri sendiri dan memisahkan diri dari Pengadilan Agama Parepare berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 87 Tahun 1966. Pada mulanya, Pengadilan Agama Barru berkantor di Kantor Bupati selama 10 Tahun, lalu berpindah ke Kantor Departemen Agama Barru.

Setelah melengkapi data dukung dan mendapatkan persetujuan dari Kantor Wilayah Departemen Agama dan Rekomendasi Pengadilan Tinggi Agama Ujung Pandang, pada tahun 1980 Pengadilan Agama Barru mendirikan gedung dengan luas 150 m² diatas tanah milik Pemerintah Kabupaten Barru dengan status pinjam pakai seluas 900 m² yang terletak di Jl. H. M. Saleh Lawa No. 36 Barru dan bangunan gedung susulan kedua pada tahun 1992 seluas 100 m².

Selanjutnya pada tahun 2006 Pengadilan Agama Barru membangun sebuah gedung baru dengan luas 737,830 m² diatas tanah Pemerintah Daerah Kab. Barru dengan status pinjam pakai dan tanah tersebut telah mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Barru untuk dihibahkan ke Pengadilan Agama Barru sesuai dengan

Keputusan DPRD No. 12 Tahun 2015 tanggal 26 oktober 2015, serta persetujuan penghapusan barang milik daerah dari Pemerintah Daerah Kabupten Barru berdasarkan Keputusan Bupati Barru NO. 489/DPKD/XII/2015 tanggal 3 Desember 2015 dengan luas 2,872 m2 yang terletak di Jalan Sultan Hasanuddin No. 111 Barru, dan diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung RI pada tahun 2007.

Adapun Wilayah hukum Peradilan Agama Barru meliputi 7 (tujuh) wilayah Kecamatan, antara lain:

1. Kecamatan Mallusetasi
2. Kecamatan Soppeng Riaja
3. Kecamatan Balusu
4. Kecamatan Tanete Rilau
5. Kecamatan Tanete Riaja
6. Kecamatan Pujananting

Pengadilan Agama Barru adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di Kabupaten Barru.

Adapun Tugas Pokok Pengadilan Agama Barru adalah :

- Menerima,
- Memeriksa, dan
- Mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya berdasarkan Peraturan Perundang undangan.

Daftar nama2 yang pernah atau telah menjabat Ketua Pengadilan Agama Barru:

1. K. H. M. Makki (1967- 1974)

2. K.H. Muh. Hasan Aliyah (1974-1984)
3. K.H. M. Mudatsir Roci, M.A (1984-1991)
4. Muh. Saleh Hasanuddin (1991-1994)
5. Drs. H. M. Jufri Ahmad S.H, M.H (1994-1997)
6. Drs. H. Amiruddin Tjiama S.H (1997-2004)
7. DRs. H. Ahmad As'ad S.H (2004- 2006)
8. Drs. H. Ambo Asse S.H, M.H (2006- 2008)
9. Drs. H. M. Anas Malik S.H, M.H (2008- 20013)
10. Drs. H. Muhammad Takdir S.H, M H (2013- 2015)
11. Drs. H. Gunawan, M.H (2015- sekarang)

Pengadilan Agama Barru sebagai lembaga peradilan yang melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman (yudikatif) dalam wilayah hukum Kabupaten Barru.

Kompetensi Peradilan Agama diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yakni dibidang Perkawinan, antara lain:

1. Izin beristri lebih dari seorang;
2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) Tahun, dalam hal orang tua wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
3. Dispensasi kawin;
4. Pencegahan perkawinan;
5. Penolakan perkawinan oleh pegawai Pencatat Nikah;
6. Pembatalan perkawinan;

7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri;
8. Perceraian karena talak
9. Gugatan perceraian;
10. Penyelesaian harta bersama;
11. Mengenai penguasaan anak-anak;
12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya;
13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
14. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak;
15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
16. Pencabutan kekuasaan wali;
17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
18. Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapanbelas) Tahun yang ditinggal kedua orang tuanya pada hal tidak ada penunjukan oleh orang tuanya;
19. Pembebanan kewajiban ganti rugi terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
20. Penetapan asal usul seorang anak;
21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;

22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan peraturan yang lain:

- a. Kewarisan.
- b. Wasiat.
- c. Hiba
- d. Wakaf.
- e. Zakat.
- f. Infaq.
- g. Shadaqah
- h. Ekonomi Syariah antara lain:
 - 1) Bank syari'ah
 - 2) Lembaga keuangan mikro syari'ah
 - 3) Asuransi syari'ah
 - 4) Reasuransi syari'ah
 - 5) Reksa dana syari'ah
 - 6) Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah
 - 7) Sekuritas syari'ah
 - 8) Pembiayaan syari'ah
 - 9) Pegadaian syari'ah
 - 10) Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah.

Pada awal Tahun 2004 dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, penyelenggaran kekuasaan kehakiman mengalami

perkembangan yang baik. Pembinaan lembaga peradilan termasuk Pengadilan Agama Baru baik pembinaan secara teknis yustisial yang menyangkut keperkaraan maupun pembinaan teknis non yustisial yang menyangkut organisasi, administrasi dan keuangan kini telah menjadi kewenangan Mahkamah Agung.

Di samping itu, empat lingkungan peradilan, yaitu:

1. Peradilan Umum.
2. Peradilan Agama.
3. Peradilan Militer.
4. Peradilan Tata Usaha Negara.

Kesemuanya masuk dalam satu atap Mahkamah Agung RI yang dikenal dengan *one roof system*.

One roof sysetem merupakan peluang bagi lembaga peradilan untuk meningkatkan profesionalisme dan kemandirian hukum. Hukum hanya dapat ditegakkan dengan kemandirian tanpa ada campur tangan/intervensi dari luar. Hukum dan keadilan akan tercampak dan hilang kewibawaaan bila telah dinodai pengaruh unsur dari luar hukum itu sendiri

1. Visi dan Misi

a. VISI

Rencana Strategis Pengadilan Agama Baru Tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektifitas dan efesiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Agama Barru diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Barru.

Visi Pengadilan Agama Barru adalah sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA BARRU YANG AGUNG ”

b. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Agama Barru, adalah sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan pelayanan yang tranparan, cepat, dan tepat waktu.
- 2) Mewujudkan kinerja yang professional
- 3) Mewujudkan pembinaan dan pengawasan yang berkualitas.

2. Rencana Strategis

Mengacu pada visi dan misi Pengadilan Agama Barru tersebut diatas, maka langkah-langkah oprasional yang dilakukan menetapkan:

a. Tujuan

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Barru adalah sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan percepatan penyelesaian perkara.
- 2) Mewujudkan transparansi dan informasi Peradilan.
- 3) Mewujudkan peningkatan mutu penyelesaian perkara.
- 4) Mewujudkan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*).
- 5) Mewujudkan Pembinaan dan Pengawasan.
- 6) Mewujudkan pelaksanaan tugas aparatur peradilan.
- 7) Mewujudkan anggaran berbasis kinerja.

b. Sasaran

- 1) Untuk “Mewujudkan percepatan penyelesaian perkara” maka sasarannya adalah meningkatnya penyelesaian perkara, percepatan penyelesaian perkara, terciptanya tertib administrasi perkara.
- 2) Untuk “Mewujudkan transparansi dan informasi Peradilan” maka sasarannya adalah terwujudnya transparansi dan informasi perkara.
- 3) Untuk “Mewujudkan peningkatan mutu penyelesaian perkara”, maka sasarannya adalah meningkatnya kinerja mutu penyelesaian perkara.
- 4) Untuk “Mewujudkan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*)”, maka sasarannya adalah peningkatan aksesibilitas terhadap pencari keadilan (*access to justice*).
- 5) Untuk “Mewujudkan Pembinaan dan Pengawasan”, maka sasarannya adalah meliputi peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan.

- 6) Untuk “Mewujudkan pelaksanaan tugas aparaturnya”, maka sasarannya adalah tercapainya tugas pokok aparaturnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- 7) Untuk “Mewujudkan anggaran berbasis kinerja”, maka sasarannya yaitu Tersedianya sarana dan prasarana untuk pelaksanaan tugas tupoksi.
- 8) Untuk “Mewujudkan peningkatan manajemen Peradilan Agama Baru”, maka sasarannya adalah terwujudnya peningkatan manajemen Peradilan Agama Baru.

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Upaya Pembuktian Hakim Pengadilan Agama Baru melalui Lemah Syahwat Sebagai Alasan Perceraian

Pembuktian adalah meyakinkan tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dimuka sidang dalam suatu persengketaan. Adapun asas pembuktian yaitu: “Barang siapa mempunyai sesuatu hak atau guna membantah hak orang lain, atau menunjukkan pada suatu peristiwa, ia diwajibkan membuktikan adanya hak itu atau adanya peristiwa tersebut”. Suatu persengketaan atau perkara tidak bisa diselesaikan tanpa adanya alat bukti, artinya kalau gugatan penggugat tidak berdasarkan bukti maka perkara tersebut akan diputus oleh Hakim tetapi dengan menolak gugatan karena tidak terbukti. Dalam kitab-kitab hukum Islam (fiqh) kebanyakan para ahli hukum Islam menyebutnya dengan *al-bayyinah* sejalan dengan hadis Rasulullah saw. Pada asas pembuktian terdahulu.¹ Adapun pembuktian dalam

¹Rohaina A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta, PT RajaGrafindo, 2003), h. 144-145.

hukum perdata terdapat dalam (Pasal 164 HIR/Pasal 284RBg/Pasal 1866 BW).

Pembuktian dalam Hukum Acara Peradilan Agama adalah:

1. Alat Bukti Tertulis

Alat bukti tertulis yang berisi keterangan tentang suatu peristiwa, keadaan, atau hal-hal tertentu. Alat bukti tertulis dibedakan menjadi 2 macam yaitu akta dan akta otentik. Akta adalah surat yang diberi tandatangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian sedangkan Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu dan dalam bentuk menurut ketentuan yang ditetapkan untuk itu. Adapun contoh alat bukti tertulis dalam kasus perceraian, misalnya dalam kasus lemah syahwat biasanya dalam bentuk surat keterangan dari dokter bahwa si suami mempunyai penyakit diabetes sehingga terjadi lemah syahwat pada dirinya.

2. Alat Bukti Kesaksian

Alat bukti kesaksian diatur dalam pasal 139-152, 168-172 HIR dan 1902-1912 BW. Kesaksian merupakan kepastian yang diberikan kepada Hakim dipersidangan tentang peristiwa yang dipersengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil dalam persidangan. Dalam hukum Islam disebut dengan *syahid* (saksi lelaki) dan *syahidah* (saksi perempuan) yang terambil dari kata *musyahadah* yang artinya menyaksikan dengan mata kepala sendiri.² Adapun syarat-syarat menjadi saksi: Beragama Islam, Baligh, Berakal, merdeka, adil, menerangkan apa yang

²Rohaina A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, h. 152.

dilihat. Sehubungan hal ini, firman Allah dalam QS. Al-Baqarah/2:282 yang terjemahnya:

...Dan Persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantara kamu). Jika tidak ada dua orang lelaki maka boleh seorang lelaki bersama dua orang perempuan dari saksi yang kamu sukai, suapaya jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil...

Hadis Riwayat Muslim

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَ³

Artinya:

Dari Zaid bin Khalid Al Juhani, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Maukah aku beritahukan kepada kalian mengenai saksi yang paling baik? Yaitu orang yang datang memberi kesaksian sebelum diminta (untuk bersaksi)?"

3. Alat Bukti Persangkaan

Persangkaan adalah kesimpulan yang oleh Undang-Undang atau oleh Hakim yang ditarik dari satu peristiwa yang diketahui umum kearah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum, Pasal 1915 KUH Perdata. Kata lain dari persangkaan adalah vermoederm yang berarti dugaan atau presumptive.⁴ Dalam Hukum Acara Peradilan Islam disebut *al qarinah*. Qarinah menurut bahasa artinya "isteri" atau "hubungan" atau "pertalian", sedangkan menurut istilah hukum (yang dimaksud

³Muslim Ibnu Al-hajjaj Abu Al-hasan al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahi Muslim*, juz III (Beirut: Dar Ihya al-Turats, +. Th), h. 1344. Hadis no. 1719.

⁴Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 684.

disini) ialah hal-hal yang mempunyai hubungan atau pertalian yang erat sedemikian rupa terhadap sesuatu sehingga memberikan petunjuk.

4. Alat Bukti Pengakuan

Pengakuan merupakan suatu bukti sepihak, dalam bahasa acara Peradilan umum disebut *bekentenis* (Belanda), *Confession* (Inggris), yang artinya salah satu pihak atau kuasa sahnya mengaku secara tegas tanpa syarat dimuka sidang apa yang dituntut oleh pihak lawannya adalah benar. Dalam Hukum Acara Peradilan Islam disebut dengan *al iqrar*. Dasar pengakuan sebagai alat bukti menurut Acara Peradilan Islam, terdapat dalam QS. An-Nisa/4:135

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ
تَلَوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.⁵

5. Alat Bukti Sumpah

Sumpah adalah suatu pernyataan yang diucapkan pada waktu memberi janji dan keterangan dengan mengikat akan sifat Maha Kuasa dari Tuhan, dan percaya bahwa siapa yang memberi janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya. Sumpah

⁵Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Syamil Qur'an, 2012), h. 100.

menurut bahasa hukum Islam disebut *al yamin* atau *al hilf* tetapi kata *al yamin* lebih umum dipakai. Alat bukti sumpah ini bermacam-macam tetapi bagaimanapun, selain dari sumpah *li'an* dan sumpah pemutus, ia tidak bisa berdiri sendiri, artinya Hakim tidak bisa memutus hanya semata-mata mendasarkan kepada sumpah tanpa disertai oleh alat bukti yang lain.⁶

6. Alat Bukti Pemeriksaan Setempat (*Discente*)

Dasar pemeriksaan setempat dapat dipakai sebagai alat bukti sebenarnya hanya tafsiran analogie (*qiyas*, Arab), atas pasal 153 HIR atau 180 RBg dan kepada keperluan praktek Pengadilan, yang kebanyakan diperoleh dari yurisprudensi. Dalam Acara Peradilan Islam, mungkin pemeriksaan setempat ini bisa dimasukkan dalam pembahasan tentang *'ilm al qadi*. Jadi sebenarnya, pemeriksaan setempat tidak perlu didistilakan sebagai alat bukti tersendiri.⁷

Tujuan dari pemeriksaan setempat agar Hakim memperoleh kepastian tentang peristiwa yang menjadi sengketa. Pemeriksaan setempat pada hakikatnya adalah juga pemeriksaan perkara dalam persidangan, hanya saja dilakukan diluar gedung, yaitu tempat dimana obyek sengketa atau yang diperiksa itu berada. Pemeriksaan dilakukan karena suatu kenyataan bahwa tidak dimungkinkannya untuk mengajukan obyek pemeriksaan kedepan sidang di gedung pengadilan.

7. Alat Bukti Keterangan Ahli (*expertise*)

Keterangan ahli adalah keterangan pihak ketiga yang objektif yang bertujuan untuk membantu hakim dalam pemeriksaan guna menambah pengetahuan Hakim

⁶Rohaina A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, h. 179.

⁷Rohaina A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, h. 188-189.

sendiri. Menggunakan keterangan ahli bertujuan untuk memperoleh kebenaran dan keadilan pada masalah yang bersangkutan.

Sedangkan alat bukti yang tidak disebutkan oleh Undang-Undang namun bisa digunakan dalam pembuktian adalah:

1. Foto, Film rekaman video/tape/CD
2. Microfilm, microfisce.

Alat-alat bukti yang telah disebutkan diatas sesuai dengan Surat Ketua MA kepada Menteri Kehakiman Nomor 37/TU/88/102/pid tanggal 14 januari 1988, yang menjelaskan bahwa hal tersebut diatas bisa dijadikan alat bukti dengan catatan terjamin otentikasinya yang dapat ditelusuri dari registrasi maupun berita acara.⁸

Dengan kata lain bahwa pembuktian itu tergantung pada seorang Hakim karena Hakimlah yang akan menetapkan kepada siapa dibebankan pembuktian, apakah penggugat atau tergugat. Bila terjadi suatu kasus yang berujung kepada suatu acara persidangan di Pengadilan maka untuk melindungi pihak-pihak yang berperkara ini dalam hukum acara keduanya dibebani bukti-bukti yang dapat mendukung tentang kebenaran gugatannya.

Apabila penggugat tidak berhasil untuk membuktikan dalil-dalilnya yang menjadi dasar gugatannya, maka gugatannya akan ditolak. Jika berhasil maka gugatannya dikabulkan, tetapi tidak semua dalil yng menjadi dasar gugatan harus dibuktikan sepenuhnya. Sehubungan hal ini, Hadis Nabi Muhammad saw. tentang pembuktian:

⁸Hari Sasangka, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata, (Bandung: CV Maju Mundur, 2005), h. 54-56.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ، وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ⁹

Artinya:

“Dari Ibnu Abbas Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Seandainya orang-orang selalu diberi (dikabulkan) dengan dakwaan mereka, niscaya orang-orang akan menuntut darah dan harta orang lain, namun bagi yang didakwa berhak bersumpah." Muttafaq Alaihi”.

Dalam hal pembuktian yang digunakan oleh Hakim dalam memutuskan perkara yaitu terdapat dalam pasal 1866 BW. Namun dalam hal perkara cerai gugat dengan alasan lemah syahwat itu sulit dibuktikan meskipun penggugat menghadirkan saksi, mungkin ada saksi mengetahui namun sekedar mengetahui saja, namun tidak secara langsung, dengan sepengetahuannya saja untuk mengantar kedokter atau menyuruh berobat namun secara ril saksi tidak melihat secara langsung, karena ini menyangkut aib seseorang.

Dan selanjutnya, adanya surat-surat medis atau keterangan dokter. Impoten itu, juga dapat dibuktikan dengan pengakuan tergugat sendiri. Jika dia tidak mengaku, maka isterinya ditanya dan dimintai untuk mendatangkan bukti tentang pengakuannya. Jika suami mengakui ketidak mampuannya mengumpuli isterinya, lalu Hakim memberikan kesempatan satu tahu untuk berobat, namun Hakim juga harus melihat apakah anatar suami dan isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya? Jika hal itu

⁹Lihat, Imam Abi Husain Muslim, *Shahi Muslim juz 3*, (Beirut: Darul Fikr, 2005), h. 1336. Hadis no.1711.

terjadi maka hakim memutuskan perkaranya dikarenakan dalam tinjauan hukum Islam mengutamakan kemaslahatan bagi para pihak.¹⁰

Namun yang terdapat dalam putusan perkara kasus ini bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat dinilai sebagai alat bukti yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti saksi sebab kedua saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah dan secara terpisah di depan persidangan, telah cukup umur, sehat jasmani dan rohani serta keterangannya satu sama lain saling mendukung dan sejalan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat tersebut maka gugatan Penggugat mengenai pisah tempat tinggal dinyatakan telah terbukti sedangkan mengenai perselisihannya tidak dapat dibuktikan karena satu orang saksi Penggugat hanya dengar cerita dari orang lain atau *testimonium de auditu*.

bahwa keterangan saksi yang didasarkan atas cerita seseorang atau lazim disebut dengan *testimonium de auditu* tidak mempunyai nilai pembuktian, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga merupakan urusan pribadi seseorang, sehingga peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalamnya jarang diketahui oleh orang lain sekalipun oleh keluarganya sendiri, sebab masalah rumah tangga adalah masalah yang menyangkut harkat, martabat dan kehormatan sebuah keluarga. Di samping itu, bagi sebagian masyarakat masih kuat beranggapan, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam suatu rumah tangga merupakan sesuatu yang harus dirahasiakan dan tidak patut diketahui oleh orang lain, dan tidak lazim pula seseorang yang berselisih atau bertengkar dalam suatu rumah tangga, terlebih dahulu

¹⁰Ugan Gandaika, SH, Hakim Pengadilan Agama Barru, wawancara, 25 April 2017, 11:47 WITA

mempersiapkan orang-orang untuk dijadikan sebagai saksi, baik dari pihak keluarga terlebih orang lain. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai adalah logis apabila sangat sukar untuk mencari saksi yang dapat menyaksikan secara langsung adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri tersebut. Apalagi untuk mencari saksi yang dapat melihat atau menyaksikan secara nyata apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut.¹¹

Jadi, upaya dalam pembuktian Hakim Pengadilan Agama Barru dalam perkara perceraian dengan alasan lemah syahwat adanya pemutusan perkara yang dilakukan oleh Hakim diputuskan melalui jalan persaksian dan pengakuan tersebut yang sejalan dengan dalil gugatan penggugat dijadikan persangkaan sebagai dasar persangkaan majelis Hakim bahwa rumah tangga penggugat tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan yang disebabkan tergugat menderita penyakit gula yang menyebabkan tergugat lemah syahwat. Menurut pandangan hukum Islam keduanya mempunyai kedudukan yang sama. Namun atas putusan perkara No.368/Pdt.G/2015/PA.Br. tergugat tidak menghadiri persidangan hingga diputuskannya kasus tersebut, maka ketidakhadirannya itu tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan penggugat.

C. Tinjauan Syariat Hukum Islam terhadap Pertimbangan Hukum yang Digunakan oleh Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perceraian

Pertimbangan Hakim yang pertama adalah adanya penggugat yang maksud dan tujuannya telah diuraikan dalam duduk perkara. Dan Majelis Hakim Dra. Hj. Hasniati D., M.H berusaha menasihati penggugat (M) agar mau kembali hidup rukun dengan tergugat serta mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tetapi tidak berhasil. Dan juga telah

¹¹ Salinan Putusan No.368/Pdt.G/2015/PA.Br.

dilakukan mediasi dengan mediator sebagaimana pasal 2 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang mewajibkan setiap perkara yang masuk di Pengadilan harus dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi, tetapi tidak berhasil juga. Berdasarkan firman Allah QS. An-Nisa/4:35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Terjemahnya:

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya. Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal.¹²

Hakim menimbang tentang alasan Cerai Gugat pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat (M) dan Tergugat (R) baik melalui mediator (Uten Tahir, S. HI., MH) yang ditunjuk untuk itu maupun melalui Majelis Hakim setiap kali persidangan, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Perma Nomor 1 tahun 2008.

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menceraikan Penggugat dan Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi cekcok terus menerus disebabkan Tergugat menderita penyakit diabetes yang

¹²Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 84.

menyebabkan Tergugat lemah syahwat bahkan Tergugat hanya meraba-raba Penggugat sehingga Penggugat merasa terganggu dan tidak bisa tidur dan telah pisah tempat selama 1 (satu) bulan tanpa saling menghiraukan lagi dan tidak ada harapan lagi untuk rukun.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga sehingga keduanya tidak dapat dirukunkan lagi?

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat hanya hadir pada sidang pertama dan pada sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah datang lagi di persidangan, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidak hadirannya itu Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat yang dengannya Penggugat tidak perlu dibebankan pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari perceraian yang tidak berdasar dan beralasan hukum, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 731103570483XXXX, tanggal 26 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barru yang telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya maka telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten Barru, sehingga Pengadilan Agama Barru berwenang untuk mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 32/0X3/IX/200X, tanggal 24 September 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru

yang telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama: Saksi I (Rs) dan Saksi II (La), keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan, bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri pernah serumah selama 11 (sebelas) tahun, namun kurang lebih 1 (satu) bulan terakhir Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat dinilai sebagai alat bukti yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti saksi sebab kedua saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah dan secara terpisah di depan persidangan, telah cukup umur, sehat jasmani dan rohani serta keterangannya satu sama lain saling mendukung dan sejalan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat tersebut maka gugatan Penggugat mengenai pisah tempat tinggal dinyatakan telah terbukti sedangkan mengenai perselisihannya tidak dapat dibuktikan karena satu orang saksi Penggugat hanya dengar cerita dari orang lain atau *testimonium de auditu*.

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang didasarkan atas cerita seseorang atau lazim disebut dengan *testimonium de auditu* tidak mempunyai nilai pembuktian, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga merupakan urusan pribadi seseorang, sehingga peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalamnya jarang diketahui oleh orang lain sekalipun oleh keluarganya sendiri, sebab masalah rumah tangga adalah masalah yang menyangkut harkat, martabat dan kehormatan sebuah keluarga. Di samping itu, bagi sebagian masyarakat masih kuat beranggapan,

bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam suatu rumah tangga merupakan sesuatu yang harus dirahasiakan dan tidak patut diketahui oleh orang lain, dan tidak lazim pula seseorang yang berselisih atau bertengkar dalam suatu rumah tangga, terlebih dahulu mempersiapkan orang-orang untuk dijadikan sebagai saksi, baik dari pihak keluarga terlebih orang lain. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai adalah logis apabila sangat sukar untuk mencari saksi yang dapat menyaksikan secara langsung adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri tersebut. Apalagi untuk mencari saksi yang dapat melihat atau menyaksikan secara nyata apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut.

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada pertimbangan tersebut di atas, maka sangat berharga dan mempunyai nilai apabila keterangan saksi tersebut yang sejalan dengan dalil gugatan Penggugat dijadikan persangkaan sebagai dasar persangkaan Majelis Hakim bahwa rumah tangga Penggugat tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat menderita penyakit gula yang menyebabkan Tergugat lemah syahwat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan terbukti. Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut di atas maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan sah sejak tanggal 23 September 2004 pernah hidup rukun layaknya suami istri selama 11 tahun;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat menderita penyakit gula yang menyebabkan Tergugat lemah syahwat.

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu bulan.¹³

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya jadi, lemah syahwat dapat dijadikan alasan perceraian yang terdapat dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yaitu:

- a. Salah satu mendapat cacat badan/penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
- b. Antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan/pertengkaran yang tidak ada harapan dapat hidup rukun dalam rumah tangganya.

Dari saksi-saksi dan alat bukti yang ada dan dengan kondisi Rumah Tangga sebagaimana yang telah disebutkan dalam gugatan, majelis hakim berpendapat akibat suami lemah syahwat karena tidak mampu lagi memberikan kepuasan seksual maka Rumah Tangga penggugat dan tergugat retak dan tidak ada keharmonisan lagi.

Akan tetapi tidak saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap lainnya dikarenakan suami lemah syahwat. Sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang tentram penuh dengan mawaddah dan Rohmah (Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21) sulit tercapai dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, yang mana keadaan Penggugat dengan Tergugat tersebut sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga yang dilakukan penggugat untuk mengajukan gugatannya kepada tergugat sudah tepat

¹³Salinan Putusan No.368/Pdt.G/2015/PA.Br.

karena apabila rumah tangganya tetap dipertahankan akan lebih memberikan penderitaan yang lebih bagi penggugat.¹⁴ Hal ini sesuai dengan kaidah fiqih yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

“Menolak kerusakan itu didahulukan dari pada menarik kebaikan.”¹⁵

الضرر يزال

Artinya:

“Kemudharatan itu harus dihapus.”¹⁶

Pengadilan Agama Barru dalam memutus perkara cerai gugat dengan alasan Lemah Syahwat dan berdasarkan alasan-alasan pokok Cerai Gugat yang diajukan oleh penggugat sebagai pertimbangan Hakim dalam memutus dan disertai alat-alat bukti dan saksi yang telah memenuhi syarat yang menguatkan gugatannya. Majelis Hakim telah melihat bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali karena sudah tidak ada keharmonisan lagi didalam membina Rumah Tangga.

Analisis Penulis

Berdasarkan putusan nomor 368/Pdt.G/2015/PA.Br. Alasan terjadinya perceraian yaitu tergugat mengalami diabetes atau penyakit gula sehingga menderita penyakit lemah syahwat, sehingga keadaan rumah tangganya tidak harmonis lagi.

¹⁴Ugan Gandaika, SH, Hakim Pengadilan Agama Barru, wawancara, 25 April 2017, 11:47 WITA

¹⁵Lihat, M. Adip Bisri, *Al-faraidul Bahiyyah*, (Kudus: Menara Kudus, 1977), h. 24.

¹⁶Lihat, M. Adip Bisri, *Al-faraidul Bahiyyah*, h. 1.

Adapun faktor penyebab terjadinya lemah syahwat yaitu fisik dan psikis. Sebagaimana telah di uraikan pada BAB II sebab-sebab lemah syahwat, secara ringkas dapat diulas kembali untuk selanjutnya dianalisa. Banyak penyebab yang melatar belakangi terjadinya lemah syahwat, dari masalah kejiwaan sampai penyakit. Adapun beberapa faktor terjadinya lemah syahwat yang dikemukakan penulis diantaranya:

- a. Diabetes atau penyakit gula, penyakit ini adalah dimana kadar glukosa dalam darah meningkat akibat kurangnya jumlah hormon insulin yang bertugas mengatur gula darah. Dalam kasus ini bisa menjadi penyebab disfungsi ereksi dan penyakit lain.
- b. Merokok, merokok juga dapat menyebabkan penyakit impotensi/lemah syahwat, dalam sampul rokok saja tertulis merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi dan gangguan kehamilan dan janin.
- c. Gangguan hormonal.
- d. Stress
- e. Depresi, dll.

Adapun pencegahannya yaitu rajin berolahraga, lakukan pola hidup sehat, hindari stress, dan hindari makanan yang bisa menyebabkan penyempitan atau penyumbatan pembuluh darah (kolesterol).

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat penulis ambil beberapa kesimpulan dan saran sebagaimana berikut.

A. Kesimpulan

Setelah melihat dan menganalisis putusan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 368/Pdt.G/2015/PA. Br. Ada beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari hal tersebut, yaitu:

1. Lemah Syahwat adalah ketidak mampuan alat kelamin pria untuk ereksi, sehingga yang bersangkutan tidak dapat melakukan kewajiban sebagaimna mestinya hubungan suami isteri atau penyakit yang penderitanya tidak mampu melakukan persetubuhan. Perceraian adalah adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak dalam perkawinan. Menurut pasal 208 KHUper menjelaskan bahwa perceraian atas persetujuan suami isteri tidak diperkenankan. Perceraian adalah berakhirnya perkawinan yang telah dibina oleh pasangan suami isteri yang disebabkan oleh beberapa hal seperti kematian dan atas keputusan pengadilan, pasal 19 Peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 juga menambahkan 2 alasan, yakni:
 - a. Salah satu mendapat cacat badan/penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
 - b. Antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan/pertengkaran yang tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangganya.

2. Tinjau hukum Islam terhadap upaya pembuktian Hakim Pengadilan Agama Barru lemah syahwat sebagai alasan perceraian adalah adanya pemutusan perkara dengan melalui jalan persaksian dan pengakuan oleh tergugat, dengan pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim yaitu, mengacu pada Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 jo. Pasal 146 KHI. Menurut pandangan hukum Islam keduanya mempunyai kedudukan yang sama. Namun atas putusan perkara No.368/Pdt.G/2015/PA.Br. tergugat tidak menghadiri persidangan hingga diputuskannya kasus tersebut, maka ketidak hadirannya itu tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan penggugat.
3. Tinjau hukum Islam terhadap pertimbangan hukum yang digunakan Hakim adalah Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasehati penggugat agar mau hidup rukun lagi dengan tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil hingga putusan di jatuhkan, sebagaimana kaidah Fiqih kemudharatan itu dapat dihilangkan. Tinjauan hukum Islam Hakim lebih mengutamakan kemaslahatan bagi para pihak.

B. Saran

1. Kepada laki-laki, terkhusus yang telah menikah agar berhati-hati dan menjaga kesehatan tubuhnya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam kehidupan be-rumah tangga nantinya.
2. Kepada isteri yang menemui kasus seperti diatas, jangan terlalu cepat mengambil keputusan untuk mengakhiri suatu ikatan pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet dan Aminuddin. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pusaka Setia, 1999.
- al-‘Awaisyah, Syaikh Husain bin ‘Audah. *Al-Mausuu’ah al-Fiqhiyyah al-musyassarah fii fiqhi kitaab was sunnah al-muthaharah*. ter. Yunus S.T., Zulfan S.Ag dan Husnel Matondang, *Ensiklopedi Fiqih Praktis Menurut Al-qur’an dan As-Sunnah*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-syafi’I, 2008.
- al-Naisaburi, Muslim Ibnu Al-hajjaj Abu Al-hasan al-Qusyairi. *Shahi Muslim*, Jus III. Beirut: Dar Ihya al-Turats, +. Th
- Bigha, Mustafa Diibul. *Fiqh Syafi’I, Terjemah At-Tahdziib*. Surabaya: Bintang Pelajar, 1984.
- Bisri. M. Adip. *Al-faraidul Bahiyyah*. Kudus: Menara Kudus, 1977.
- Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Effendi, Satria. *Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Gramedia, 2004.
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.
- , *Fiqh Munakahat*. Cet. I; Jakarta: Prenda Media, 2003.
- Ghoffar, Muhammad Abdul. *Menyikapi Tingkah Laku Suami*. Cet. I; Jakarta: Almahira, 2006.
- Harahap, M. Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No.7 Tahun 1989*. Edisi II. Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- , *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Hawari, Dadang. *Al-Qur’an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1996.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Bandung: Syamil Qur’an, 2012
- Maloko, M. Thahir. *Perceraian dan Akibat Hukum dalam Kehidupan*. Makassar: Alauddin University Press, 2014.
- Moleong, Lexi J. *Metode Penelitian Kualitatif*. edisi refisi. Bandung: Rasdakarya, 2004
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Khamsah*, ter. Masykur1 A.B., *Fiqh lima Mazhab*. Jakarta: Lentera, 2009.
- Muhammad, Ra’i. *Ilmu Fikih Islam Lengkap*. Cet. I; Semarang: Toha Putra, 1978.
- Muhdlo, A. Zuhdi. *Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk*. Cet. II: Bandung: Al-Bayan, 1995.
- Muhtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

- Mulati, *Hukum Perkawinan Islam*. Tangerang: PT Pustaka Mandiri, 2012.
- Muslim, Imam Abi Husain, *Shahih Muslim Juz 3*. Beirut: Darul Fikr, 2005.
- Poerwadarminta, W. J. S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Edisi III. Cet. II; Jakarta: PT Balai Pustaka, 2003.
- Qal'ahji, Muhammad Rawwas. *Mausu'ah Fiqhi Umar Ibnul Khathab ra*, terj. Abddul Mujieb As, *Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khathab ra*, Edisi I. Cet. I: Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.
- Rasyid, Rohaina A., *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta, PT RajaGrafindo, 2003.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Bandung: Al-Ma'arif, 1990.
- Salinan Putusan No.368/Pdt.G/2015/PA.Br.
- Samin, Sabri dan Andi Narmaya Aroeng, *Fikih II* Makassar: Alauddin Press, 2010.
- Shiddieqy, Hasbi Ash. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: PT Bulan Bintang, 1990.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Soemiaty, *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan*. Yogyakarta: liberty, 1982.
- Subagyo, Joko P. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 1987.
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfa Beta, 2009.
- Surtiretna, Nina. *Bimbingan Seks Suami Isteri*. Bandung : PT Remaja Roskarya, 2004.
- Suryabarata, Suryadi. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Ugan, Gandaika, SH, Hakim Pengadilan Agama Barru, wawancara, 25 April 2017, 11:47 WITA.
- Umar, Ibnu Muhalli Abdullah. *Menyongsong Hidup Baru Penuh Berkah*. Cet. I; Yogyakarta: Media Insani, 2001.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang, No. 7 Tahun 1989.
- KUH, *Undang-Undang. No. 1 Tahun 1974*, Jakarta: Wipress, 2008.
- Peraturan Pemerintah. No. 9 Tahun 1975.

Sumber Internet

Copyright©2006, *Mengobati Lemah Syahwat Dengan Al-Qur'an*.
[http://caraterbaikmengobatipenyakit.blogspot.co.id/2015/11/mengobati-lemah-syahwat-dengan al-quran.html?m=1](http://caraterbaikmengobatipenyakit.blogspot.co.id/2015/11/mengobati-lemah-syahwat-dengan-al-quran.html?m=1), 28 April 2017

Pendidikan Islam Copyright©2007, *Pembahasan Lengkap mengenai perceraian/Talak dalam islam*. [http://www.masuk-islam.com/pembahasan-lengkap-mengenai-perceraiantalak-dalam-islam-pengertian-cerai-hukum-cerai-syarat-rukun-dalil-ceraimasa-iddah-macam-macam cerai-dll.html](http://www.masuk-islam.com/pembahasan-lengkap-mengenai-perceraiantalak-dalam-islam-pengertian-cerai-hukum-cerai-syarat-rukun-dalil-ceraimasa-iddah-macam-macam-cerai-dll.html). 21 Mei 2017.





LAMPIRAN-LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PROSES WAWANCARA





Foto bersama Bapak Ketua Pengadilan Agama Barru



Foto bersama Salah Satu Panitera Pengadilan Agama Barru

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jln.sultanalauddin No.63 Telp(0411) 864928 – 864931 (Fax 864923)

Kepada yang terhormat

Ketua jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum

Di

Tempat

AssalamuAlaikumWr.Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :Astria ningsi
NIM :10400113056
Semester :Tujuh
Jurusan :Perbandingan Mazhab dan Hukum
Fakultas :Syaria'ah dan Hukum

Dengan ini mengajukan beberapa judul skripsi sebagai berikut:

- Copern* *11-2016* ✓
1. Lemah syahwat sebagai alasan perceraian perspektif hukum Islam (studi kasus di PA Barru). ✓
 2. Legalitas barang lelang dalam pandangan hukum islam (studi kasus barang Kejaksaan Negri Sungguminasa). ✓
 3. Pembagian harta warisan anak dari perkawinan turun ranjang.
 4. Hak kepemilikan terhadap barang temuan dalam pandangan hukum Islam dan hukum fositif.
 5. Kedudukan Masalah Mursalah sebagai penetapan hukum (perbandingan empat Mazhab)

Dengan permohonan ini saya ajukan, atas perhatian bapak saya ucapkan banyak terimakasih

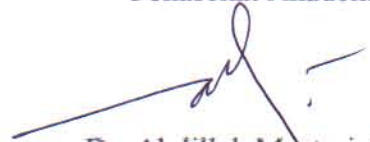
WassalamuAlaikumWr.Wb

Samata, 01 November 2016

Pemohon

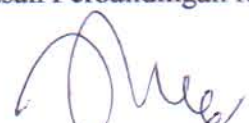

Astria ningsi

Penasehat Akademik


Dr. Abdillah Mustari, M.Ag

Mengetahui

Sekertaris jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum


Dr.Achmad Musyahid Idrus,M.Ag

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara **ASTRIA NINGSI, NIM: 10400113056** mahasiswa jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, setelah mengoreksi secara saksama skripsi dengan judul: ***Lemah Syahwat Sebagai Alasan Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di PA Barru Atas Putusan Perkara Nomor 368/Pdt.G/2015/PA.Br)***, memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat- syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk mengikuti ***Seminar Proposal***.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk digunakan lebih lanjut.

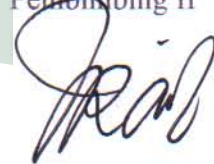
Pembimbing I



Dr. Darsul Puyu, M.Ag

NIP:19640417 199303 1 002

Pembimbing II



Irfan, S.Ag, M.Ag

NIP:19710518 200003 1 002

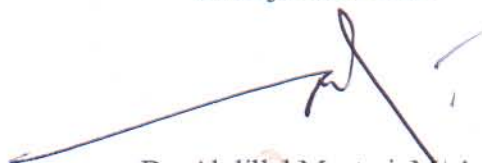
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

M A K A S S A R

Mengetahui:

Ketua jurusan PMH



Dr. Abdillah Mustari, M. Ag

NIP.19730710 200003 1 004

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
Nomor : 609 Tahun 2016
T E N T A N G
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING DRAFT/ SKRIPSI
TAHUN 2015/2016


- Menimbang** :
- Bahwa penulisan karya ilmiah (skripsi) merupakan salah satu persyaratan pada jenjang Strata Satu (S1) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, untuk itu dipandang perlu menetapkan **Dosen Pembimbing**;
 - Bahwa mereka yang tersebut namanya dalam Surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dan disertai tugas sebagai **Dosen Pembimbing Draft/Skripsi**.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
 - Peraturan Presiden RI Nomor : 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Status IAIN Alauddin Makassar menjadi UIN Alauddin Makassar;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 85 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
 - Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 129 C tahun 2013 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Menunjuk saudara : 1. Dr. Darsul Puyu, M. Ag
2. Irfan, S. Ag., M. Ag

Sebagai pembimbing mahasiswa :

- Nama : Astria Ningsih
NIM : 10400113056
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul Skripsi : Lemah Sahwat sebagai Alasan Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di PA Barru berdasarkan Putusan Perkara Nomor 133/pdt.G/2013/PA.Br).
- Melaksanakan pembimbingan skripsi sampai mahasiswa tersebut selesai menulis karya tulis ilmiah dengan baik;
 - Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya **Surat Keputusan** ini dibebankan kepada Anggaran (DIPA) UIN Alauddin Nomor : 025.04.2.307314/2016 Tanggal 14 November 2015
 - Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditandatangani di : Samata
Pada tanggal : 21, November 2016
Dekan,

Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M. Ag
NIP. 19621016 199003 1 003

Tembusan :

- Yth 1. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata – Gowa;
2. Para Dekan dalam lingkup UIN;



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Kampus I Jl. Sl. Alauddin Makassar Tlp. (0411) 864924 Fax 864923
Kampus II Jl. Sl. Alauddin No. 36 Samata Sungguminasa- Gowa Tlp. (0411) 424835 Fax 424836

Nomor : SI. 1/PP.00.9/168/2017

Samata, April 2017

Sifat : Penting

Lamp : -

Hal : **PERMOHONAN IZIN PENELITIAN**

Kepada

Yth Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan
Cq. Kepala UPT P2t, BKPMMD Prov. Sul-Sel

Di
Makassar

Assalamu' Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa Mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang tersebut dibawah ini :

Nama	: Astria Ningsi
Nim	: 10400113056
Fakultas/Jurusan	: Syari'ah dan Hukum/Perbandingan Mazhab & Hukum
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: Jl. Toddopuli 22 No. 111 Blok. 35

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Adapun judul skripsinya :

Lemah Syahwat Sebagai Alasan Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus PA Barru) Atas Putusan Perkara Nomor 368/Pdt.G/2015/PA.Br.

Dengan Dosen Pembimbing : 1. Dr. Darsul Puyu, M. Ag
: 2. Irfan, S. Ag., M. Ag

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya mahasiswa yang bersangkutan dapat diberi izin untuk melakukan penelitian pada tanggal 20 April 2017 s/d 20 Mei 2017 di Kantor Pengadilan Agama, Kabupaten Barru.

Demikian harapan kami, atas bantuan bapak di ucapakan terima kasih.

Wassalam

Samata, April 2017

An Rektor

Dekan



Prof. Dr. Darussalam syamsuddin, M. Ag
NIP. 19621016 199003 1 003



1 2 0 1 7 1 9 1 4 2 5 1 5 4

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 5032/S.01P/P2T/04/2017
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

KepadaYth.
Ketua Pengadilan Agama Barru

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Nomor : SI.1/PP.00.9/1681/2017 tanggal 12 April 2017 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : **ASTRIA NINGSI**
Nomor Pokok : 10400113056
Program Studi : Perbandingan Mazhab & Hukum
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. Sultan Alauddin No.36 Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" LEMAH SYAHWAT SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PA BARRU) ATAS PUTUSAN PERKARA NOMOR 368/Pdt.G/2015/PA.Br "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **20 April s/d 19 Mei 2017**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 17 April 2017

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



A. M. YAMIN, SE., MS.

Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth

1. Dekan Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar
2. Peringgal.

SIMAP PTSP 17-04-2017



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://p2tbkpmmd.sulselprov.go.id> Email : p2t_provsulsel@yahoo.com
Makassar 90222





PENGADILAN AGAMA BARRU

Jl. Sultan Hasanuddin No. 111, Barru 90711, Telp.0427-322000, Fax.0427-21771
Website : <http://pa-barru.go.id>, Email : barru.pa@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor W20-A16/ **188**/PB.01/V/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Pengadilan Agama Barru menerangkan bahwa :

N a m a : Astria Ningsi

Nomor Pokok : 10400113056

Program Study : Perbandingan Mazhab & Hukum

Pekerjaan : Mahasiswa (S1)

Judul : LEMAH SYAHWAT SEBAGAI ALASAN
PERCERAIAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA BARRU)
ATAS PUTUSAN PERKARA NOMOR
368/Pdt.G/2015/PA.Br

Benar telah mengadakan penelitian pada Kantor Pengadilan Agama Barru selama 1 (satu) bulan, terhitung mulai tanggal 20 April 2017 s/d 19 Mei 2017 untuk penulisan Skripsi tersebut. sesuai dengan surat Izin Penelitian dari Pemerintah Kabupaten Barru Dinas Penanaman Modal, Pelayanan terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Nomor 5032/S.01P/P2T/04/2017 tanggal 17 April 2017.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Barru, 22 Mei 2017

Ketua

Drs. H/ Gunawan, M.H

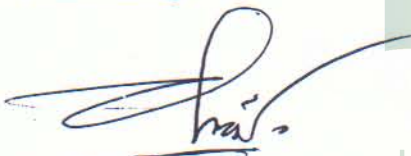
NIP. 196812291994031005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara **ASTRIA NINGSI, NIM: 10400113056** mahasiswa jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, setelah mengoreksi secara saksama skripsi dengan judul: ***Lemah Syahwat Sebagai Alasan Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus PA Barru Atas Putusan Perkara Nomor 368/Pdt.G/2015/PA.Br)***, memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat- syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk mengikuti ***Seminar Hasil***.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk digunakan lebih lanjut.

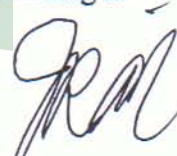
Pembimbing I



Dr. Darsul Puyu, M. Ag

NIP.19640417 199303 1 002

Pembimbing II

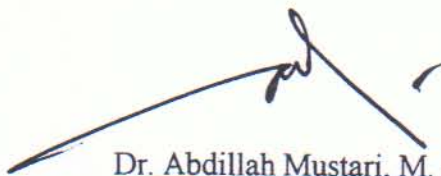


Irfan, S. Ag, M. Ag

NIP.19710518 200003 1 002

Mengetahui:

Ketua jurusan PMH



Dr. Abdillah Mustari, M. Ag

NIP.19730710 200003 1 004

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR
Nomor : 286 Tahun 2017
TENTANG
PANITIA DAN PENGUJI UJIAN SEMINAR HASIL /SKRIPSI
TAHUN 2017

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

Membaca : Surat Permohonan :
Nama : Astria Ningsi
N I M : 10400113056
Jurusan : Perbandingan Mazhab & Hukum
Hari/Tanggal : Senin, 29 Mei 2017
Prihal : Ujian Seminar Hasil/Skripsi
Judul : "Lemah Syahwat Sebagai Alasan Perceraian Perspektif hukum Islam (Studi kasus PA Barru Atas Pututsan perkasa Nomor 368/Pdt.G/2015/PA.Br)"

Menimbang : a. Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Ujian Seminar Hasil/Skripsi;
b. Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan dan ketentuan di atas, maka perlu ditunjuk Panitia dan Dosen Penguji;
c. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas melaksanakan kegiatan dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Manandatangani Surat Keputusan;
4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 25 Tahun 2013 juncto Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
6. Keputusan UIN Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Membentuk Panitia dan Penguji Ujian Seminar Hasil /Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan komposisi sebagai berikut :

Ketua : Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
Sekretaris : Dr. Abdillah Mustari, M.Ag
Penguji I : Dr. Hamzah Hasan, M.Hi
Penguji II : Dr. Nurtaufik Sanusi, M.Ag.
Pelaksana : 1. Mujahidah, SE
2. Nurhayati wahid

Kedua : Panitia bertugas mempersiapkan penyelenggaraan Ujian Seminar Hasil/Skripsi
Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2017;
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samata
pada tanggal : 29 Mei 2017



Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
NIP. 19621016 199003 1 003

Nomor : SLI/PP.000.9/1962/2017
Sifat : Penting
Lamp : -
Hal : **UNDANGAN SEMINAR HASIL**

Samata, 29 Mei 2017

Kepada

- Yth.*
1. Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag (Ketua)
 2. Dr. Ahmad Musyahid, M.A (Sekretaris)
 3. Dr. Hamzah Hasan, M.Hi (Penguji I)
 4. Dr. Nurtaufik Sanusi.M.Ag. (Penguji II)
 5. Dr. Darsul Puyu., M.Ag.,M.HI. (Pembimbing I)
 6. Irfan,S.Ag., M.Ag (Pembimbing II)
 7. Pelaksana

Di
Makassar

Assalamu 'Alaiikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa Ujian Seminar Hasil/Skripsi atas nama :

Nama : Astria Ningsi
N I M : 10400113056
Jurusan : Perbandingan Mazhab & Hukum

Untuk maksud tersebut, maka kami mengundang Saudara/(i) pada Ujian Seminar Hasil/Skripsi, insya Allah Dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 31 Mei 2017
Waktu : Pukul 16.00-17.00 Wita
Tempat : Ruang Jurusan PMH

Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.



Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.
NIP. 19621016 199003 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 63 Makassar ☎ (0411) 868720, Fax. (0411) 864923
Kampus II : Jl.H.M. Yasin Limpo No.36, Romangpolong-Gowa ☎ (0411) 841879, Fax.(0411) 8221400

DAFTAR NILAI
UJIAN AKHIR PROGRAM STUDI/KOMPREHENSIF
SEMESTER ...VIII... (.....Delapan.....) WISUDA PERIODE
TAHUN AKADEMIK 2016/2017

N a m a : ASTRIA NINGSI

N I M : 10400113056

Jurusan : PMH

Judul Skripsi : Lemah syahwat sebagai Alasan Perceraian Perspektif Hukum Islam (studi kasus PA Baru atas putusan perkara Nomor 360/pdt.G/2015/PA.Br)

NILAI MATA KULIAH				JUMLAH RATA-RATA
MKDU	MKDK	MKPP	KESELURUHAN	
(Dirasah Islamiyah)	(Fikih/Ushul Fikih)			
4	4	4	12	4

Samata, 08 Mei 2017

Kasubag.
Akademik dan Kemahasiswaan



MUJAHIDAH, S.E
NIP : 19670309 199303 2 002

PERSETUJUAN PENGUJI DAN PEMBIMBING

Penguji penulisan skripsi saudara **ASTRIA NINGSI**, NIM: 10400113056, Mahasiswa jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul: *Lemah Syahwat Sebagai Alasan Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus PA Barru Atas Putusan Perkara Nomor 368/Pdt.G/2015/PA.Br)*, memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan kesidang Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk digunakan lebih lanjut.

Samata, 6 Juni 2017

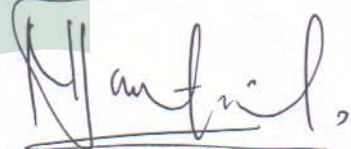
Penguji I



Dr. Hamzah Hasan, M. Hi

NIP.19631231 199302 1 003

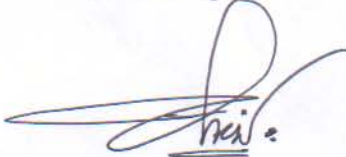
Penguji II



Dr. Nurtaufik Sanusi, M. Ag

NIP.19780519 2003121 004

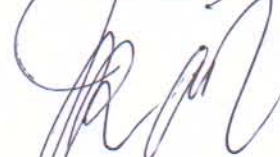
Pembimbing I



Dr. Darsul Puyu, M. Ag

NIP.19640417 199303 1 002

Pembimbing II



Irfan, S. Ag, M. Ag

NIP.19710518 200003 1 002

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Astria Ningsi lahir di jawi-jawi pada tanggal 09 juni 1995. Anak kedua dari tiga bersaudara dan merupakan buah cinta dari suami istri Muh. Tamrin dan Halimah. Penulis memulai pendidikannya SD 59 Tanete Kabupaten Bulukumba tahun 2001 dan tamat pada tahun 2007, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke Madrasah Tsanawiyah Negeri 410 Tanete (MTsN) dan tamat pada tahun 2010. Kemudian pada tahun 2010 penulis melanjutkan sekolah di Madrasah Aliya Negeri 1 Tanete (MAN) dan tamat pada tahun 2013. Kemudian ditahun yang sama penulis lulus dan melanjutkan studi pada Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum program Strata satu (S1) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R